



LAPORAN DELEGASI DPR RI OECD GLOBAL PARLIAMENTARY NETWORK 2025

5-7 Februari 2025 Paris - Perancis



THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

2025



LAPORAN
DELEGASI DPR RI

**OECD GLOBAL
PARLIAMENTARY
NETWORK
2025**

5-7 Februari 2025
Paris - Perancis



LAPORAN DELEGASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA MENGHADIRI
OECD Global Parliamentary Network 2025
Paris – Perancis, 5-7 Februari 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

OECD *Global Parliamentary Network* merupakan pusat pembelajaran legislatif bagi legislator dan pejabat parlemen yang dibentuk pada tahun 2011. Strukturnya yang fleksibel memungkinkan anggota parlemen dari seluruh spektrum politik untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi praktik yang baik, dan membina kerja sama legislatif internasional.

Para anggota memperoleh manfaat dari analisis dan rekomendasi OECD mengenai isu-isu yang sedang mereka tangani, dan dapat bertemu dan bertukar pikiran dengan rekan sejawat dan pakar untuk membandingkan praktik terbaik.

Jaringan ini menempatkan Anggota Parlemen di garis depan percakapan kebijakan, dan memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dalam isu-isu yang paling mendesak dalam agenda legislatif mereka.

Pertemuan OECD *Global Parliamentary Network* berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Februari 2025, di Pusat Konferensi OECD di Paris, Prancis. Dengan hampir 140 anggota parlemen dan 45 pejabat parlemen yang mewakili lebih dari 40 negara, keberagaman perspektif dan kedalaman diskusi sangat luar biasa.

Rapat Pleno 2025 menampilkan berbagai sesi, termasuk pertemuan bilateral dengan meja ekonomi negara-negara OECD, konsultasi tentang Strategi Pembangunan OECD, beberapa fokus pada Iklim dan AI, tetapi juga pada Energi, ekonomi Global, pergeseran Demografi, Survei Keterampilan Orang Dewasa OECD, dan kebijakan Persaingan.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi DPR RI pada OECD *Global Parliamentary Network 2025* ini berdasarkan :

1. Surat kepada Ketua DPR RI perihal Undangan untuk menghadiri OECD *Global Parliamentary Network 2025* yang diselenggarakan di Paris, Perancis.
2. Hasil keputusan Rapat Pimpinan BKSAP yang menyetujui kehadiran Delegasi DPR RI di Pertemuan tersebut.
3. Surat Tugas Nomor 03/KU.05.01/ST/KSOI/1/2025 tentang Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri OECD *Global Parliamentary Network 2025* di Paris, Perancis.

C. Susunan Delegasi

Adapun susunan dan komposisi Delegasi DPR RI pada OECD *Global Parliamentary Network 2025* di Paris, Perancis antara lain:

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1	Bramantyo Suwondo, M.IR.	F. P-Demokrat / A.557	Wakil Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
2	Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.	F. P-Golkar / A.336	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
3	Dr. Mufti Aimah Nurul Anam	F. PDIP / A. 215	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi

D. Tujuan

Tujuan dari pengiriman Delegasi DPR RI ke OECD *Global Parliamentary Network 2025* di Paris, Perancis antara lain:

1. Berpartisipasi dan berperan dalam OECD *Global Parliamentary Network 2025* untuk menguatkan diplomasi parlemen Indonesia dan melaksanakan mandat dari UU MD3 untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyampaikan pandangan DPR RI terkait dengan penguatan peran parlemen dan kesiapan Indonesia dalam proses aksesi ke dalam OECD.
3. Menjalin kerja sama yang lebih erat dan menguatkan jaringan DPR RI dengan parlemen global terkhusus parlemen negara anggota OECD untuk mendukung aksesi Indonesia untuk masuk ke OECD.



II. LAPORAN

A. Agenda Sidang

OECD Global Parliamentary Network 2025 diselenggarakan selama 2 (dua) hari di Paris, Perancis dengan jadwal agenda sebagai berikut:

DAY 1: 5 Februari 2025	
Waktu	Agenda
11:00 - 11:25	Opening session with OECD Secretary-General Mathias Cormann
11:45 - 13:00	Global economic outlook
14:30 - 15:45	Climate adaptation and resilience
16:00 - 17:15	Climate mitigation and net-zero transition
17:15 - 18:15	Consultation on the OECD Development Strategy
DAY 2: 6 Februari 2025	
09:00 - 10:00	Skills for a changing world – The OECD Survey of Adult Skills
10:15 - 11:15	Governing with AI
11:15 - 12:15	AI in Work, Innovation, Productivity and Skills
14:00 - 15:15	Demographic shifts
15:15 - 16:30	Update on energy markets and trends
16:45 - 18:00	Competition policy
DAY 3: 7 Februari 2025	
09:30 - 11:30	Special session on Accession



B. Partisipasi Delegasi DPR RI

1. Hari ke-1

a. Opening Session

Global Parliamentary Network 2025 dibuka oleh Sekretaris Jendral OECD, Mathias Cormann. Dalam pidato sambutannya Cormen menyampaikan selamat datang kepada delegasi parlemen dari negara anggota OECD, negara yang sedang dalam proses aksesi OECD dan negara pengamat dalam pertemuan ini.

b. Global Economic Outlook

Dalam sesi ini dijabarkan oleh Alvaro S. Pereira, Kepala Ekonom OECD. Dijelaskan pada sesi ini adalah proyeksi OECD terkait pertumbuhan PDB global sebesar 3,3% pada tahun 2025, naik dari 3,2% pada tahun 2024 dan 3,3% pada tahun 2026.

Inflasi di OECD diperkirakan akan mereda lebih lanjut, dari 5,4% pada tahun 2024 menjadi 3,8% pada tahun 2025 dan 3,0% pada tahun 2026, didukung oleh kebijakan moneter yang masih ketat di sebagian besar negara.



Delegasi BKSAP DPR RI foto bersama dengan peserta sesi Global Economic Outlook, OECD GPN 2025. Dok: BKSAP

Ketatnya pasar tenaga kerja juga mereda, meskipun tingkat pengangguran secara umum tetap pada atau mendekati level terendah dalam sejarah. Namun, risiko membayangi proyeksi sentral yang relatif jinak. Risiko utama berkaitan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, inflasi yang ternyata lebih persisten dari yang diantisipasi, dan penetapan ulang risiko yang tajam di pasar keuangan.

Pandangan delegasi DPR RI mengenai isu ini adalah dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang telah menetapkan target pembangunan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025, yang sejalan dengan tujuannya pada tahun 2024 dan didukung oleh Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (UU APBN 2025). Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan dan menavigasi ketidakpastian kondisi global, Indonesia telah menerapkan pendekatan kebijakan campuran melalui bank sentralnya untuk memastikan stabilitas ekonomi.

c. **Climate Adaptation and Resilience**

Sesi ini memaparkan tugas utama OECD tentang adaptasi dan ketahanan iklim, memberikan gambaran umum kepada para pembuat kebijakan tentang bagaimana OECD dapat mendukung pemerintah Anggota dan non-Anggota di semua tingkatan. Narasumber pada sesi ini adalah Wakil Kepala Direktorat Lingkungan OECD, Kumi Kitamori, dan Wakil Sekretaris Jedral OECD, Mary Beth Goodman.



Anggota BKSAP DPR RI Adde Rossi Khoerunnisa menyampaikan pandangan DPR RI terkait isu-isu terkini di forum OECD GPN 2025. Dok: BKSAP

Delegasi DPR RI, Adde Rossi Khoerunnisa menyampaikan bahwa DPR RI memandang penanganan perubahan iklim sebagai prioritas nasional dan internasional yang utama. DPR RI sangat mendukung berbagai komitmen dan tujuan internasional, termasuk yang disepakati dalam *Conference of the Parties* (COP). Sebagaimana dinyatakan pula dalam dokumen hasil Sidang Parlementer pada COP 29 di Baku, Azerbaijan, pada bulan November 2024, penting untuk meningkatkan urgensi adaptasi dan memberikan dukungan adaptasi secara memadai.

Beberapa langkah hukum telah ditempuh Indonesia, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim. Selain itu, Program Kampung Iklim yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi iklim.

DPR RI terus berkomitmen untuk menggalang upaya guna memastikan kerja sama yang efektif, khususnya antara negara maju dan berkembang, dalam memastikan pemenuhan komitmen pendanaan iklim untuk perubahan iklim, termasuk Dana Kerugian dan Kerusakan (*Loss and Damage Fund*).

d. **Climate Mitigation and Net-Zero Transition**

Pada sesi ini dijelaskan mengenai peran OECD dalam upaya mitigasi iklim, menyoroti apa yang dapat dilakukan para pembuat kebijakan untuk mencapai transisi menuju nol emisi bersih melalui tindakan kebijakan yang efektif dan ambisius. OECD bekerja sama dengan pemerintah Anggota dan non-Anggota di semua tingkatan, serta dengan masyarakat sipil dan pelaku sektor swasta untuk memastikan komitmen iklim diterjemahkan menjadi tindakan efektif yang dipercepat, termasuk melalui penyelarasan dan peningkatan pendanaan dan investasi secara cepat dari semua sumber. Sebagai narasumber adalah Wakil Kepala Direktorat Lingkungan OECD, Kumi Kitamori, dan Wakil Sekretaris Jendral OECD, Mary Beth Goodman.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyampaikan dalam intervrensinya bahwa untuk terwujudnya transisi Net-Zero, kerja sama internasional kerja sama tetap dibutuhkan. Ia menekankan bahwa OECD harus menjadi platform untuk memastikan komitmen apa pun, termasuk investasi hingga 300

miliar USD per tahun pada tahun 2035 untuk negara-negara berkembang benar-benar terwujud. OECD harus menjadi platform untuk memastikan kerja sama yang didasarkan pada prinsip “tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing” dan yang mematuhi pilar-pilar pembangunan berkelanjutan – ekonomi, sosial dan lingkungan, serta tata kelola yang baik.

Bramantyo juga mendorong kerja sama, sumber daya energi terbarukan; pengembangan mineral yang berkelanjutan; transportasi hijau; dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Terkait hal ini, Indonesia menargetkan energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Selain itu, RUU Energi Baru dan Terbarukan telah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna untuk menjadi RUU Inisiatif DPR.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menyampaikan pandangan DPR RI terkait Net-Zero Transition. Dok: BKSAP

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu membangun listrik hijau hingga 8.224,1 Megawatt (MW) yang membutuhkan investasi sekitar Rp 216 triliun. Secara keseluruhan, Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun USD untuk (mencapai) emisi nol bersih pada tahun 2060. Dan total potensi energi terbarukan di Indonesia adalah 3.687 Gigawatt, yang terdiri dari energi surya, angin, hidro, bioenergi, panas bumi, dan juga laut.

Salah satu potensi energi surya terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (369,5 GWp), Riau (290,4 GWp), dan Sumatera Selatan (285,2 GWp).

e. **Consultation on the OECD Development Strategy**

OECD bertujuan untuk menggabungkan perspektif dari para legislator saat menyusun Strategi Pembangunan yang baru. Hal ini terkait dengan tujuan keseluruhan OECD untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif serta membantu menciptakan peluang yang lebih baik bagi semua orang, termasuk dengan bekerja sama dengan pasar-pasar baru dan negara-negara ekonomi berkembang di dalam dan di luar keanggotaan. Beberapa elemen strategi tersebut dapat mencakup:

- Memanfaatkan kekuatan inti OECD, termasuk kapasitas analitisnya, basis bukti multidisiplin, dan rekam jejaknya dalam mendukung solusi multilateral yang efektif dan inklusif.
- Memberikan penawaran yang komprehensif untuk mendukung rencana dan upaya pembangunan negara-negara.
- Memperkuat koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan, meningkatkan saling pengertian dengan negara-negara mitra tentang potensi dampak standar OECD.

Indonesia ingin menegaskan kembali komitmen nasional kami untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Oleh karena itu, sangat penting bagi OECD New Development Strategy (NDS) untuk mencerminkan SDGs sebagai acuan kebijakan utama. Penting bagi NDS untuk menyediakan akses yang sama bagi negara-negara berkembang dalam hal bantuan teknis dan berbagi pengetahuan di sektor transisi energi, ekonomi hijau, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital. Indonesia juga berharap agar NDS mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara yang unik dan mempromosikan inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup secara keseluruhan – karena faktor-faktor tersebut tidak diperhitungkan.

2. Hari ke-2

a. **Skills for a changing world – The OECD Survey of Adult Skills**

Pada sesi ini membahas mengenai bagaimana orang dewasa dapat mengembangkan keterampilan dasar, seperti – membaca dan

memahami teks, bekerja dengan angka, dan memecahkan masalah yang rumit –terutama di tengah kemajuan teknologi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Narasumber pada sesi ini adalah Andreas Schleicher, Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD, dan Yoshiki Takeuchi, Wakil Sekretaris Jendral OECD.

Dibahas juga revolusi digital tengah membentuk kembali ekonomi dan masyarakat, sangat penting untuk mengevaluasi kecakapan orang dewasa dalam literasi, numerasi, dan pemecahan masalah adaptif. Literasi memungkinkan individu untuk memahami dan berinteraksi dengan berbagai informasi, mulai dari konten daring hingga dokumen yang rumit. Numerasi sangat penting untuk mengelola keuangan, menafsirkan data, dan membuat keputusan yang tepat. Pemecahan masalah adaptif memungkinkan orang dewasa untuk menghadapi tantangan secara langsung, berinovasi, dan beradaptasi dengan keadaan baru.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk mendukung dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pengembangan berkelanjutan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang kompeten guna mencapai tujuan tersebut selama dekade berikutnya.



Delegasi BKSAP DPRR RI yang hadir pada OECD GPN 2025. Dok: BKSAP

Indonesia juga telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk berbagai kebijakan Pembelajaran Sepanjang Masa yang bersifat lintas sektoral. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 dirancang untuk meningkatkan daya kerja, daya saing, dan produktivitas melalui pendidikan vokasi. Program Pra-Kerja dikembangkan dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta menumbuhkan keterampilan kerja yang lebih baik bagi para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau mereka yang memerlukan peningkatan kompetensi.

b. **Governing with AI**

Sesi ini diisi oleh Direktur Pemerintahan Publik OECD, Elsa Pilichowski. Ia menguraikan tren utama dan tantangan kebijakan dalam pengembangan, penggunaan, dan penerapan AI di dan oleh sektor publik. Sesi ini membahas potensi manfaat dan risiko spesifik yang terkait dengan penggunaan AI di sektor publik. Selanjutnya dijelaskan bagaimana AI di sektor publik dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, daya tanggap, dan akuntabilitas. Sesi ini juga memberikan gambaran umum tentang isu-isu kebijakan utama dan menyajikan contoh-contoh bagaimana negara-negara mengatasinya di seluruh OECD.



Delegasi BKSAP DPRR RI yang hadir pada OECD GPN 2025. Dok: BKSAP

Indonesia menyoroti konsekuensi dari penerapan sistem persenjataan otonom yang menggunakan AI dan dapat secara mandiri mencari, memilih, dan menggunakan kekuatan terhadap

target tanpa campur tangan manusia, yang dapat berdampak buruk pada hak asasi manusia untuk hidup. Indonesia juga berpandangan bahwa perlu dan penting untuk mempertimbangkan pembentukan Komite Masa Depan di negara atau parlemen kita masing-masing yang menggabungkan masa depan dalam proses pengambilan keputusan saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi lebih lanjut kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan seiring dengan perkembangan dunia.

c. AI in Work, Innovation, Productivity and Skills

Dalam sesi ini, Angelica Salvi Del Pero – penasihat senior direktur OECD untuk Ketenagakerjaan, Perburuhan dan Urusan Sosial – memaparkan tentang dampak AI di pasar tenaga kerja di seluruh OECD dan membahas langkah-langkah kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi risiko penggunaan AI di pasar tenaga kerja.



Delegasi BKSAP DPRR RI yang hadir pada OECD GPN 2025. Dok: BKSAP

Temuan OECD menunjukkan bahwa AI memiliki dampak transformasional pada pasar tenaga kerja kita. Seperti yang ditunjukkan dalam Prospek Ketenagakerjaan OECD 2023, sejauh ini hanya ada sedikit bukti bahwa AI menyebabkan hilangnya pekerjaan. Dalam banyak kasus, AI memiliki dampak positif pada beberapa dimensi kualitas pekerjaan. Namun, potensi otomatisasi

tetap tinggi, dengan pekerjaan yang paling berisiko mengalami otomatisasi mencapai 27% dari pekerjaan di seluruh OECD. AI juga membentuk kembali komposisi tugas dari banyak pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukannya.

Dalam konteks pengembangan AI di tempat kerja, Pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas untuk mengatasi kesenjangan digital, menjamin manfaat nyata AI bagi masyarakat, mengantisipasi dan memitigasi risiko di masa mendatang, serta memastikan tata kelola global yang konsisten dengan kepentingan nasional dan negara berkembang.

Indonesia berpendapat bahwa pengembangan AI di tempat kerja harus mempertimbangkan kesenjangan kapasitas antarnegara di seluruh dunia, termasuk kapasitas sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan keuangan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi kesenjangan kapasitas tersebut. Saat ini, DPR RI tengah membahas RUU Keamanan Siber sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Diharapkan pembahasan RUU ini dapat meningkatkan keamanan siber nasional, termasuk perlindungan dari ancaman siber berbasis AI, dan juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap infrastruktur digital nasional.

d. Demographic shifts

Sesi ini mengkaji implikasi penuaan populasi terhadap pasar tenaga kerja dan kebijakan yang perlu dipertimbangkan negara-negara untuk membantu mempertahankan standar hidup di negara-negara OECD, termasuk mempromosikan pekerjaan bagi orang lanjut usia dengan kesehatan yang baik dan perempuan serta memanfaatkan keterampilan migran secara maksimal. Narasumber pada sesi ini adalah Stefano Scarpetta, Ketenagakerjaan, Perburuhan dan Urusan Sosial OECD dan Yoshiki Takeuchi, Wakil Sekretaris Jendral OECD.

Dipaparkan bahwa masyarakat di negara-negara OECD hidup lebih lama dan menua dengan kesehatan yang lebih baik daripada di masa lalu. Namun, tingkat kesuburan di negara-negara OECD telah anjlok, dan saat ini hampir setengah dari angka pada tahun 1960. Tanpa adanya kebijakan yang mengimbangi, tren demografi ini akan menyebabkan menurunnya jumlah tenaga kerja, membebani keuangan publik, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Indonesia telah mengalami masa bonus demografi sejak tahun 2012, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat

hingga mencapai 74,39 (tinggi) pada tahun 2023. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPR dapat memperkuat program nasional dalam mengatasi pergeseran demografi tersebut.

Indonesia juga mendorong kebijakan lintas sektor yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas manusia, termasuk di bidang ketenagakerjaan, teknologi informasi, dan pendidikan. Meningkatkan kualitas kesehatan dan harapan hidup masyarakat, termasuk melalui pemerataan akses, infrastruktur, dan kualitas layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil. Merumuskan kebijakan lansia yang komprehensif untuk memfasilitasi lansia produktif, termasuk dengan memperpanjang usia pensiun, menyediakan akses pasar kerja bagi lansia untuk sektor tertentu, meningkatkan harapan hidup, dan meningkatkan literasi lansia terkait instrumen investasi.

e. **Update on energy markets and trends**

Sesi ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi tren terbesar dalam permintaan dan pasokan energi, serta apa artinya bagi keamanan energi, emisi, dan pembangunan ekonomi. Narasumber sesi ini adalah Tim Gould, Kepala Ekonom Energi dari International Energy Agency (IEA).

Saat ini, pasar energi global tengah mengalami ketidakpastian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk transisi menuju energi terbarukan, fluktuasi harga minyak dunia, dan ketegangan geopolitik.



Ssasana sidang OECD Global Parliamentary Network 2025. Dok: BKSAP

Sebagai strategi, Indonesia beradaptasi dengan pasar energi global dengan memprioritaskan diversifikasi sumber energi, termasuk penggunaan gas alam, transisi menuju energi terbarukan, dan efisiensi energi. Sesuai dengan komitmen aksi iklimnya untuk mengurangi emisi dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, Indonesia berkomitmen untuk lebih mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam sistem energi nasional dan mengelola fluktuasi pasokan energi terbarukan.

Saat ini, RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) tengah dibahas di DPR. RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas dan berupaya menyelaraskan sektor energi Indonesia dengan prinsip-prinsip berkelanjutan sekaligus mendorong pengembangan dan penerapan sumber energi terbarukan.

f. **Competition policy**

Pada sesi ini dibahas sistem pasar yang kompetitif dan adil memberikan konsumen barang dan jasa yang lebih bermutu, harga yang lebih rendah, dan produk inovatif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Otoritas persaingan dan pemerintah harus mendorong terciptanya persaingan yang adil bagi para pesaing dan memastikan bahwa kebijakan publik tidak menghalangi pasar untuk bekerja secara efisien, sekaligus tetap mencapai tujuan kebijakan pemerintah. Panelis pada sesi ini antara lain Carmine Di Noia, Direktur Urusan Keuangan dan Perusahaan, dan Yoshiki Takeuchi, Wakil Sekretaris Jendral OECD.

Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pasar yang sehat di mana lebih banyak orang mampu membeli produk, bisnis dapat bertahan dan berkembang, serta meningkatkan ekonomi nasional. Indonesia menyediakan kerangka hukum terkait kebijakan persaingan yang dikembangkan melalui Undang-Undang Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999), yang kemudian diubah dengan UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023.

Selain itu, peningkatan kerja sama internasional terkait persaingan usaha diperlukan. Hal ini mencakup penyeragaman kapasitas penegakan hukum persaingan usaha melalui bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta mendorong kolaborasi dalam penegakan hukum persaingan lintas batas.

3. Hari ke-3

a. **Special Session on Accession**

Penyelenggaraan sesi ini hanya terbuka untuk anggota parlemen dari negara-negara yang bergabung dengan OECD dan negara-negara yang sedang dalam proses aksesi. Sesi ini akan memberikan masukan kepada anggota parlemen tentang proses bergabung dengan OECD dan peran parlemen dalam mendukung hal ini. Sesi ini juga akan memberikan kesempatan untuk saling belajar di antara anggota parlemen dari negara yang telah bergabung sebagai anggota masih dalam proses untuk bergabung dengan OECD, di mana mereka akan dapat bertukar pengalaman, pelajaran, dan pendekatan.



Foto bersama seluruh delegasi OECD Global Parliamentary Network (GPN) 2025.

Dok: BKSAP

Pada sesi ini secretariat OECD menyampaikan manfaat yang didapat ketika negara bergabung dalam OECD. OECD sendiri menyediakan bantuan teknis bagi negara anggota dan calon negara anggota dalam menyelaraskan dan mengimplementasikan reformasi dalam negeri, meningkatkan tata kelola global, berbagi pengetahuan antar negara, sistem perawatan kesehatan yang efektif, sistem pendidikan (pembandingan), sistem perpajakan, harmonisasi kebijakan terkait bisnis (yaitu panduan untuk

investasi, usaha kecil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, ketenagakerjaan / tempat kerja). Beberapa catatan OECD terhadap Indonesia adalah penyelarasan instumen hukum terkait Peraturan Anti Suap.

Delegasi Indonesia menyampaikan komitmen kuat dalam mensukseskan proses aksesi OECD dan kesiapan parlemen dalam mendukung dari segi regulasi dan harmonisasi peraturan. DPR RI menyampaikan dukungan implementasi Peta Jalan Aksesi Indonesia ke OECD yang telah disahkan pada awal tahun 2024. DPR RI menyatakan peran penting parlemen dalam harmonisasi peraturan dan undang-undang dan memastikan agar sejalan dengan standar OECD dan juga kepentingan nasional Indonesia. Melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam memastikan proses aksesi berjalan secara transparan, inklusif, dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Parlemen juga akan berdialog secara aktif dengan masyarakat dan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik secara domestic maupun internasional.

Beberapa negara berbagi pengalaman dan tantangan mereka selama proses aksesi OECD, dengan menawarkan wawasan yang berharga. Costa Rica menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang inklusif, yang sangat penting dalam menyelaraskan prioritas nasional dengan persyaratan OECD. Rumania, yang memulai upaya aksesi sekitar dua setengah tahun lalu, berfokus pada kesiapan kelembagaan dengan membentuk komite parlemen gabungan yang didedikasikan untuk masalah-masalah OECD. Negara ini secara aktif memfasilitasi debat publik dan kesadaran warga negara, sekaligus menyusun undang-undang antisuap. Bagian penting dari strategi Rumania adalah mengidentifikasi anggota parlemen untuk bertindak sebagai pejuang OECD, mempromosikan tujuan tersebut di dalam parlemen dan daerah pemilihan mereka.

Kroasia memasuki tahap akhir aksesi, memperoleh dukungan politik yang luas dari semua partai di parlemen. Negara ini membentuk komisi OECD khusus untuk bertindak sebagai penghubung antara parlemen dan cabang eksekutif. Meskipun memiliki komitmen politik yang kuat, Kroasia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mereformasi perusahaan milik negara dan memperbarui kerangka legislatifnya agar selaras dengan standar OECD. Latvia memperlakukan keanggotaan OECD sebagai prioritas nasional dan meningkatkan partisipasinya dalam forum internasional, dengan tujuan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pembuatan kebijakan global.

Lithuania berkonsentrasi pada peningkatan koordinasi kelembagaan dan reformasi undang-undang untuk meningkatkan lingkungan bisnisnya. Negara ini mengadopsi sistem klasifikasi “Merah-Kuning-Hijau” untuk menilai kesiapan lembaga publik dan membentuk kelompok kerja untuk setiap instrumen utama OECD. Lithuania juga memprioritaskan pemenuhan semua persyaratan akses lebih awal untuk menghindari koreksi pasca-aksesi yang mahal. Di sisi lain, Peru menghadapi masalah transparansi dan pengawasan, khususnya dalam cara penilaian OECD—seperti yang menyangkut sektor kesehatan—dipersepsikan. Sementara OECD memuji reformasi tertentu, baik parlemen Peru maupun publik menyatakan skeptisme, yang menyoroti kesenjangan antara penilaian eksternal dan persepsi internal.



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. OECD *Global Parliamentary Network 2025* yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada 5-7 Februari 2024 ini telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan rekomendasi bagi negara-negara yang sedang dalam proses akses OECD, termasuk Indonesia.
2. Konferensi Regional ini mendorong kolaborasi antar negara dalam menghadapi perkembangan tantangan global, termasuk di dalamnya adalah terkait ekonomi global, kemajuan teknologi (AI), dinamika kondisi demografi, dan transisi energi hijau.
3. DPR RI telah memberikan pandangan substantif dalam menyampaikan intervensi terhadap tema diskusi, dimana keseluruhan pandangan telah dimasukkan sebagai bagian rekomendasi bagi OECD.
4. Partisipasi DPR RI juga dilaksanakan dalam bentuk diskusi bilateral dengan panitia OECD yang khusus menangani proses akses Indonesia, dan dalam diskusi ini menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi, dan Badan terkait.

B. Saran

1. Hasil OECD *Global Parliamentary Network 2025* ini memerlukan implementasi dari parlemen masing-masing negara. Oleh karena ini, rekomendasi dari konferensi ini perlu disampaikan kepada Komisi-Komisi terkait di DPR RI untuk ditindaklanjuti.
2. DPR RI perlu berkoordinasi dengan OECD terkait dengan penguatan regulasi nasional agar sejalan dengan ketentuan akses Indonesia ke OECD. Hal ini bisa dijalankan melalui peningkatan kapasitas yang melibatkan Badan dan Komisi terkait di DPR RI, Kementerian dan Lembaga terkait, dan OECD.



IV. PENUTUP

A. Anggaran

Rangkaian kegiatan dan partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI OECD *Global Parliamentary Network* 2025 yang berlangsung pada tanggal 5-7 Februari 2025 di Paris Perancis menggunakan mata anggaran MAK: 2025.001030.CF.5805.AEC.001.C.524211 sebesar Rp884.822.750.00,- (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

B. Keterangan dan Lampiran

1. Lampiran undangan, jadwal pertemuan dan intervensi
2. Foto Dokumentasi ([link](#))
3. Link Publikasi Media
 - a. [OECD Harus Pastikan Investasi Iklim 2035 Benar Terwujud](#)
 - b. [Penanganan Perubahan Iklim Adalah Prioritas Utama](#)
 - c. [Sidang OECD Parliamentary Network, BKSAP: Persoalan Perubahan Iklim Prioritas Utama](#)
 - d. [BKSAP Tegaskan Investasi Hijau Kunci Atasi Perubahan Iklim](#)

C. Ucapan Terimakasih

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi Delegasi pada OECD *Global Parliamentary Network* 2025 dapat tercapai dengan baik.

Ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada Duta Besar RI di Paris, Perancis beserta jajaran atas bantuan dan dukungan serta fasilitas

yang diberikan kepada Delegasi DPR RI dan Sekretariat sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat Jendral DPR RI, Biro Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, dan Tenaga Ahli atas dukungan teknis dan substansi sejak sebelum dan selama pertemuan berlangsung.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai pustaka sejarah partisipasi DPR RI dalam kegiatan diplomasi parlemen melalui keikutsertaan dalam forum-forum antar parlemen. Laporan ini juga dapat menjadi rujukan bagi keikutsertaan DPR RI dalam forum-forum antar parlemen lainnya di masa mendatang.

D. Kata Penutup

Demikian Laporan Delegasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Delegasi DPR RI atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Jakarta, 10 Februari 2025

a.n. Delegasi

Ketua Delegasi

Bramantyo Suwondo, M.IR.

LAMPIRAN





**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
PARIS**

<input checked="" type="checkbox"/>	SEGERA
<input type="checkbox"/>	SANGAT SEGERA
<input type="checkbox"/>	KILAT

47-49 rue Cortambert, 75116 Paris, France Tel. +33 145030760
Fax. +33 145045032 Email: paris.kbri@kemlu.go.id

Kepala Perwakilan R.I

Mohamad Oemar
Duta Besar LBBP RI

BERITA BIASA

Nomor : B-00338/Paris/241120
 Kepada Yth : Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Perekonomian
 U.p Yth. : Dirjen Amerop, Dirjen KS Multilateral-Kemlu; Sesmenko Perekonomian (Sekretaris Timnas Proses Aksesi OECD), Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional-Kemenko Perekonomian
 Info Yth. : All Wamenlu, Dir Sosbud OINB, Dir PELH, Dir Eropa 1-Kemlu; Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Multilateral-Kemenko Perekonomian
 Dari : Dubes RI Paris
 Jumlah hal : 2 Halaman
 Perihal : Penyampaian *Save the Date* terkait Pelaksanaan *OECD Global Parliamentary Network* pada 5-7 Februari 2025

Ringkasan Berita

- OECD menyampaikan informasi *save the date* terkait *OECD Global Parliamentary Network* yang akan dilaksanakan pada 5-7 Februari 2025 di OECD, Paris.
- Mohon kiranya bantuan Pusat untuk dapat menyampaikan informasi dimaksud kepada pihak terkait di DPR RI serta mendorong disampaiannya *focal point* dari delegasi Parlemen Indonesia pada kesempatan pertama.

Merujuk perihal pada pokok berita, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KBRI Paris telah menerima informasi *save the date* dari *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* terkait rencana pelaksanaan *OECD Global Parliamentary Network (GPN)* pada 5-7 Februari di OECD, Paris.
2. Kegiatan OECD GPN 2025 akan terdiri dari dua kegiatan yaitu pertemuan pleno dan pertemuan bilateral.

➔ Pertemuan pleno OECD GPN akan berlangsung pada 5-6 Februari 2025 atas kerjasama dengan *Parliamentary Assembly of the Council of Europe*, *NATO Parliamentary Assembly* dan *Woman Political Leaders*.

Catatan: sebagai informasi awal jumlah maksimum anggota delegasi pada pertemuan pleno ini adalah 2 + 1.

- ➔ Pertemuan bilateral akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025 berdasarkan permintaan delegasi. Lebih lanjut, akan diadakan juga sesi khusus bagi anggota-anggota Parlemen negara-negara yang tengah menjalani proses aksesi ke OECD.
3. Guna mempermudah koordinasi, Sekretariat GPN mengundang partisipan untuk dapat menyampaikan informasi terkait *focal point* dari delegasi tiap negara melalui surel ke COMGPN@oecd.org. Informasi lebih lanjut terkait program kegiatan, informasi registrasi untuk anggota Parlemen serta jumlah maksimum delegasi dalam pertemuan akan disampaikan oleh Tim GPN pada kesempatan pertama.

Catatan

4. OECD GPN adalah platform yang didirikan OECD sejak 2011, guna memperkuat hubungan dan dialog antar parlemen dari negara-negara anggota maupun mitra OECD. GPN memungkinkan para pembuat kebijakan untuk berbagi pengalaman, wawasan, dan *best practices* dalam isu-isu global seperti pembangunan ekonomi, kebijakan sosial, digitalisasi, perubahan iklim dan sebagainya.
5. Sekiranya tidak terdapat pertimbangan lain, kami berpandangan bahwa pertemuan ini akan bermanfaat bagi anggota Parlemen Indonesia yaitu tidak saja untuk memperluas jejaring kerja serta berbagi pengalaman dan *best practices*, namun juga untuk menjembatani antara kepentingan nasional dan standar internasional yang penting dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD.
6. Dalam kaitan ini, mohon kiranya bantuan Pusat untuk dapat menyampaikan informasi *save the date* dimaksud kepada pihak-pihak terkait di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Paris, November 2024

Petugas Komunikasi



Fathur Rohman

Pembuat Berita



Agnes Chronika Manurung
Sekretaris Pertama

Draft Agenda of the GPN Plenary Meeting

The meeting will offer an opportunity for Members of Parliament and OECD experts to engage in dialogue on a range of critical issues, focusing on OECD's key areas of work.

Day 1 : February 5, 2025

08:45 - 09:15	ARRIVAL AND COFFEE
09:15 - 10:30	Bilateral meetings with OECD economic country desks Participants will have the opportunity to discuss their own country's economy with an OECD economist working on their country, in informal breakout sessions.
11:00 - 11:25	Opening session with OECD Secretary-General Mathias Cormann Mathias Cormann , Secretary-General, OECD
11:30 - 11:40	GROUP PHOTO
11:45 - 13:00	Global economic outlook The global economy has remained resilient this year, despite differences in the strength of activity across countries and sectors. Inflation has continued to moderate and headline inflation is now back to central bank targets in most economies. Labour market tightness has also eased, although unemployment rates generally... Álvaro S. Pereira , Chief Economist, OECD
13:00 - 14:30	NETWORKING LUNCH
14:30 - 15:45	Climate adaptation and resilience Progress towards net-zero emissions must go hand in hand with efforts to build the resilience of people, economies and ecosystems to the mounting impacts of climate change. The OECD supports governments as they face the challenging task of taking action today to reduce vulnerability and exposure to future climate... Jo Tyndall , Director, Environment Directorate, OECD Mary Beth Goodman , Deputy Secretary-General, OECD
15:45 - 16:00	COFFEE BREAK
16:00 - 17:15	Climate mitigation and net-zero transition While the window for keeping the global temperature increase below 1.5°C is rapidly closing, achieving this goal remains possible and is essential. The OECD is working to identify and evaluate economically efficient and socially responsible pathways to achieve net-zero emissions at the global, national and regional level covering ... Jo Tyndall , Director, Environment Directorate, OECD Mary Beth Goodman , Deputy Secretary-General, OECD
17:15 - 18:15	Consultation on the OECD Development Strategy Mary Beth Goodman , Deputy Secretary-General, OECD
18:15 - 19:30	RECEPTION Salon du Parc

Day 2 : February 6, 2025

08:30 - 09:30	ARRIVAL AND COFFEE
09:00 - 10:00	Skills for a changing world – The OECD Survey of Adult Skills

In today's fast-paced, information-rich societies, having the right skills is more important than ever. How can governments ensure that adults have relevant skills for the labour market and social life? This is where the OECD's Survey of Adult Skills comes in. It assesses how well adults can read and understand text, work with...

Yoshiki Takeuchi, Deputy Secretary-General, OECD

Andreas Schleicher, Director for the Directorate of Education and Skills, OECD

10:00 - 10:15

COFFEE BREAK

10:15 - 11:15

Governing with AI

OECD countries are increasingly investing in better understanding the potential value of using Artificial Intelligence (AI) to improve public governance. The use of AI by the public sector can increase productivity, responsiveness of public services, and strengthen the accountability of governments. However, governments...

Elsa Pilichowski, Director for Public Governance, OECD

11:15 - 12:15

AI in Work, Innovation, Productivity and Skills

The OECD is working with governments around the world to measure and analyse the impact of AI on training needs and labour markets. We aim to help governments to create AI-related policies that are both responsible and human-centred, and that improve the wellbeing of individuals and society as a whole....

Angelica Salvi Del Pero, Senior Advisor to the OECD's Director for Employment, Labour and Social Affairs, OECD

12:15 - 12:30

BREAK

12:30 - 13:45

WORKING LUNCH

13:45 - 14:00

COFFEE BREAK

14:00 - 15:15

Demographic shifts

Yoshiki Takeuchi, Deputy Secretary-General, OECD

Stefano Scarpetta, Director for Employment, Labour and Social Affairs, OECD

15:15 - 16:30

Update on energy markets and trends

The IEA's flagship World Energy Outlook, published every year, is the most authoritative global source of energy analysis and projections. It identifies and explores the biggest trends in energy demand and supply, as well as what they mean for energy security, emissions and economic development....

Fatih Birol, Executive Director, International Energy Agency (IEA)

16:30 - 16:45

COFFEE BREAK

16:45 - 18:00

Competition policy

Well-designed competition law, effective enforcement and competition-based economic policy promote consumer welfare and economic growth while making markets more flexible and innovative. The OECD actively encourages governments to promote competitive practices and foster market-oriented reform throughout the...

Yoshiki Takeuchi, Deputy Secretary-General, OECD

Carmine Di Noia, Director for Financial and Enterprise Affairs, OECD

Day 3 : February 7, 2025

09:00 - 16:00

BILATERAL MEETINGS (ON DEMAND)

Please contact us at parliamentarians@oecd.org to request bilateral meetings with OECD experts.

09:30 - 11:30

Special session on Accession

This session is open only to MPs from OECD Accession countries.

This session will brief the MPs on OECD accession processes and the role for parliaments. It will also provide a...

09:30 - 11:00

2025 Global Outlook on Financing for Sustainable Development

Launch of the 2025 Global Outlook on Financing for Sustainable Development ahead of the United Nations 4th International Conference on Financing for Development, in the presence of the OECD Secretary General Mathias Cormann.

© Organisation for Economic
Co-operation and Development

Terms and Conditions

Privacy Policy

Follow us:





OECD Global Parliamentary Network 2025

Paris – Perancis, 5 – 7 Februari 2025

Suggested Point of Intervention:

**The House Representatives of
The Republic of Indonesia**

DAY 1

Wednesday, 5 February 2025

Session 1 – Global Economic Outlook

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- Global economic growth is predicted to remain steady in 3.3 percent in 2025 and 2026. Despite of steady growth, it is appeared to be below historical average of 3.7 percent since 2000-2019.¹
- Despite of the steady growth, we have to anticipate some challenges which can affect the growth trajectory, such as tight monetary and fiscal policy, geopolitical tensions, technological transformation, and climate issues.

¹ IMF, January 2025, World Economic Outlook Update.

- The Indonesian government has established an economic development target of 5.2% for 2025, which is aligned with its 2024 objective and is supported by the 2025 State Budget Law (UU APBN 2025).
- To address the challenges and navigate the uncertainties of the global condition, Indonesia has implemented a mixed policy approach through its central bank to ensure economic stability.
 - This approach includes the following: maintaining interest rates, stabilizing the rupiah, and promoting inclusive development.
- Domestic consumption continues to be the principal driver of Indonesia's economic performance. And the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), which account for 61% of GDP and employ 97% of the labor force, is also pivotal to Indonesia's economic strategy.
- In 2024, the value of Indonesia's digital economy reached around USD 90 billion and as the largest digital economy in Southeast Asia.
- The government also invests in human resource training in digital technology, including Digital Talent Scholarships, to strengthen the competitiveness and capacities of Indonesian youth in overcoming the challenges of the digital economy.
- We want to emphasize our commitment to shifting towards cleaner energy sources. With the increasing worldwide demand for green energy solutions, Indonesia's investments in solar, geothermal, and other renewable energy sectors will foster long-term growth potential.
- Lastly, through multilateral cooperation, like the OECD, we should establish a resilient economy that can adapt to both domestic and international challenges, address income inequality, advance green technology, and foster digital innovation.

Thank you

Session 2: Climate Adaptation and Resilience

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- No nation on Earth, including Indonesia, is susceptible to the damaging impacts of climate change and global warming.

- Climate change adversely affects people's guaranteed social and economic rights jeopardizes the efforts toward achieving gender equality... and causes extreme weather events and rising sea levels as well as damage infrastructures and supply chain.
- The Indonesian Parliament views tackling climate change to be the top national and international priority.
- Our parliament has been strongly supporting various international commitment and goals, including those agreed at Conference of Parties (COP). As also stated in the outcome document of the Parliamentary Meeting at COP 29 in Baku, Azerbaijan, in November 2024 it is important to raise the level of urgency of adaptation and of supporting adaptation adequately.
- There have been several legal actions adopted by our Country, including Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 33 of 2016 concerning Guidelines for Preparation of Climate Change Adaptation Actions and Regulation No. P7 of 2018 concerning Guidelines for the Assessment of Vulnerability, Risk, and Impact of Climate Change.
- There are also several measures that need to be highlighted and that we prioritize on, including but not limited to:
 - Rehabilitation and Restoration of mangrove;
 - Climate Early Warning system to related sectors such as agriculture, health, water and energy;
 - Encouraging local food diversification to reduce dependence on rice by utilizing commodities such as cassava.
 - Food crop activities in ex-flooded land;
 - Increasing access to agricultural business credits for farmers.
- In addition, the Climate Village Program (*Program Kampung Iklim*), managed by the Ministry of Environment and Forestry, to encourage community's involvement in climate actions.
- Our Parliament remains committed to galvanize efforts to ensure effective cooperation, particularly between developed and developing countries on ensuring fulfilment of climate funding commitments on climate change, including Loss and Damaged Fund.
- We also look forward to hearing insights on best practices and ways to strengthen Indonesia's cooperation with other OECD countries moving forward especially based on various OECD instruments, including Climate Adaptation Investment Framework

Thank you.

Session 3: Climate mitigation and net-zero transition

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- In an effort to combat climate change, Indonesia's own greenhouse gas emission reduction target in Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), is now 31.89%, while the target with international support is 43.20%.
- We are of the view that investing in a greener and renewable energy, transitioning away from fossil fuels is one of key strategies to eradicate climate change while ensuring socio-economic growth. It has also been the main focus of Indonesia in combatting climate change.
- In this regard, Indonesia set a target of achieving 23 percent renewable energy mix by 2025. As well, the New and Renewable Energy Bill was mutually agreed upon at the Plenary to become our parliament Initiative Bill.
- To this end, Indonesia needs to build green electricity of up to 8,224.1 Megawatts (MW) to achieve the target, which requires an investment of around IDR 216 trillion. Also, in overall, Indonesia needs an investment of more than 1 trillion USD to (achieve) net zero emissions by 2060.
- It must be emphasized that the total potential of renewable energy in Indonesia is 3,687 Gigawatts, consisting of solar energy, wind, hydro, bioenergy, geothermal, and also the sea. One of the largest solar energy potentials in Indonesia is in the provinces of East Nusa Tenggara (369.5 GWp), Riau (290.4 GWp), and South Sumatra (285.2 GWp).

Ladies and gentlemen,

- As cooperation is still inherently needed, we are of the view that OECD must be the platform to ensure any commitments, including investments of up to 300 billion USD a year by 2035 to developing countries is truly realized.
- Furthermore, must be the platform to ensure cooperation that is based on “common but differentiated responsibilities and respective capabilities” principle... and that adheres to the pillars of sustainable development – economy, social and environment, as well as good governance.

- The Indonesian Parliament is also very open to strengthening inter-parliamentary cooperation through OECD to support our ambition to tackle climate change once and for all...
- Furthermore, to encourage cooperation on, among others, renewable energy resources; development of sustainable critical minerals; green transportation; and electric vehicle battery ecosystem development.

Thank you

Session 4: Consultation on the OECD Development Strategy

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- The House Representatives of Indonesia appreciate that the OECD is considering to adopt the New Development Strategy back in 2025 as part of institutional reform and making the organization more inclusive to all.
- Indonesia believes that the New Development Strategy (NDS) can take part as one of solutions to the interconnected challenges faced by global community.
- We would like to reiterate our national commitment to support the achievement of sustainable development goals by 2030. Thus, it is imperative that OECD NDS reflects the SDGs as main policy reference.
- It is crucial for the NDS to provide equal access for developing countries in terms of technical assistance and knowledge sharing in energy transition, green economy, sustainable development financing, and digital transformation sectors.
- We also hope that the NDS should consider the condition and needs of each country are unique and promote the social inclusion, environmental sustainability, and the overall quality of life – as factors are not taken into account.
- To ensure robust sustainable development, indeed we must think “out of the box” – avoiding the use of GDP as the dominant measures of growth.
- Parliament has a pivotal role in shaping policies that prioritize the well-being of our citizens and the sustainability of our planet – to measure growth.

- In the process of determining the indicators of growth beyond GDP, three things we must always remember:
 - First, inclusive approach and engagement in establishing the new indicators must be put forward.
 - Second, **it is not a “one-size fits all” process**. Countries national and local context must be taken into account to avoid generalization of needs and growth of the people.
 - Third, **priorities must be given to those needing the most**. It is critically important to ensure that the outcome of this process aims to ensure adequate support for the developing countries based on their actual needs.
- We also look forward to hearing insights on best practices and ways to strengthen Indonesia's cooperation with other OECD countries in regards of the New Development Strategy that can benefit all countries.

Thank you.



OECD Global Parliamentary Network 2025

Paris – Perancis, 5 – 7 Februari 2025

Suggested Point of Intervention:

**The House Representatives of
The Republic of Indonesia**

DAY 2

Thursday, 6 February 2025

Session 1: Skills for a changing world – The OECD Survey of Adult Skills

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- Globalization, evolving work dynamics, digital progress, and the green transition require a skilled and adaptable workforce for young people as well as older people.
- The International Labor Organization (ILO) stressing the importance of relevant, inclusive and resilient skill and lifelong learning through the adoption the ILO Strategy on Skills and Lifelong Learning for 2022–2030.

- Indonesia has established a vision of *Indonesia Emas 2045* (Golden Indonesia 2045), which is characterized by the enhancement of Indonesia's status as an upper middle-income country.
- The House of Representatives of Indonesian is committed to support and work with multiple stakeholders in utilizing the demographic bonus to promote the continuous development of a competent workforce's education and skills in order to achieve this objective over the next decade.
- We recognize that we faced several challenges, such as skills inequality and shortage of skilled workers, in achieving the vision of Golden Indonesia.
- Therefore, Indonesia has implemented a number of policies to address these challenges, including various cross-sectoral Lifelong Learning policies.
 - Indonesia's 2025-2045 Education Roadmap is designed to promote employability, competitiveness, and productivity by means of vocational education.
 - The Pre-Employment Program (*Program Pra-Kerja*) has been developed with the objective of fostering entrepreneurship, increasing productivity and competitiveness, and fostering increased work skills among job seekers, workers who have been struck off, or those who require improvement in their competencies.
- Parliaments have crucial role in the formulation of regulations that effectively, inclusively, and cross-sectoral support productivity, particularly lifelong learning.

Thank You.

Session 2 – Governing with AI

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- The rapid development of technology has greatly impacted our lives and activities. It unlocks new possibilities for innovation, enhance productivity, as well as improves public services and our decision-making process to help us better understanding the citizen needs.

- On the other hand, the emerging technologies, including Artificial Intelligence (AI) also put forth immense human rights challenges that we must not ignore. This includes AI driven data leakage, may jeopardize individuals' right to privacy and even our national security.
- In addition, deepfake intimate images, and AI-generated content may violate the right to the preservation of human dignity, personal honour, reputation.
- We must also highlight the consequences of deploying autonomous weapons systems that uses AI and can independently search, select and apply force to targets without human intervention, which may adversely affect human beings' right to life.
- OECD parliaments must effectively use its legislative function, take actions and provide an equal protection through laws and policies, grounded in human rights, to ensure technologies are operated in a responsible manner.
- I am also of the view that it is necessary and important to consider having the Committee of the Future in our own respective country or parliament that incorporates the future in present decision-making process, so as to further identify new possibilities in the future as the world is evolving.
- I also hope that OECD can adopt and implement such mechanism that can facilitate dialogues and exchange experience in that regard, even with those outside OECD Countries and Parliaments.
- Once again, thank you very much. I hope that my insights can be beneficial to all participants gathered here today.

Session 3: AI in Work, Innovation, Productivity and Skills

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- The existence of AI including its increasingly widespread use in society, according to the Ministry of Communication and Digital, is not seen as a threat, but rather a great opportunity and challenge, especially for the younger generation.
- In the context of the development of AI in the workplace, the Indonesian Government has established priorities to address the digital divide, guarantee the genuine benefits

of AI for society, anticipate and mitigate future risks, and ensure global governance that is consistent with the interests of national and developing countries.

- One of the government's five priorities in the AI sector is the development of digital talent.
 - This can be achieved by promoting cross-sector collaboration among government, academics, and industry to develop sustainable and inclusive solutions.
 - Additionally, the government emphasizes the importance of equitable distribution of telecommunications infrastructure, particularly to ensure that the younger generation in remote areas has access to AI and technology.
- We are of the opinion that the development of AI in the workplace must consider the disparities in capacity among countries worldwide, including the capacity for human resources, technology, infrastructure, and finance. Consequently, concrete measures must be taken to address these capacity inequalities.
- Currently the House Representatives of Indonesia are discussing the legislative bill on Cyber Security as part of National Legislative Program (*Prolegnas*).
- It is anticipated that the discussion of this legislation will enhance national cyber security, including protection from AI-based cyber threats, and also foster public confidence in the national digital infrastructure.
- We also believe that through this inter-parliamentary cooperation, we can strengthen the regulatory architecture surrounding AI, ensuring AI is used effectively and ethically, and can contribute to the welfare of the people.

I thank you.

Session 4: Demographic Shift

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- Indonesia currently has a population of 277.5 million people, and it is anticipated that this figure will increase to 328 million by 2050.

- Indonesia has been experiencing a demographic bonus period since 2012, and the Human Development Index (HDI) has continued to rise, reaching 74.39 (high) in 2023.
- However, the demographic dividend in Indonesia is anticipated to conclude in 2039, and the country will transition into the aging population stage in 2045.
 - Consequently, in order to guarantee the success of the Golden Indonesia 2045 vision, it is imperative to implement measures to maximize current demographic advantage.
- Through its legislative and oversight functions, parliament can strengthen national programs addressing this demographic shift.
 - Encourage cross-sectoral policies that support lifelong learning to improve human quality, including in the fields of employment, information technology, and education;
 - Improve the quality of health and life expectancy of the community, including through equal access, infrastructure, and quality of health services to remote areas;
 - Strengthen an effective and measurable, inclusive, and digital-based social protection system to avoid errors in distribution and utilization;
 - Formulate a comprehensive elderly policy to facilitate productive elderly, including by extending the retirement age, providing access to the labor market for elderly for specific sectors, increasing life expectancy, and increasing elderly literacy regarding investment instruments;
 - Strengthen job training centers, including to form a skilled workforce that meets the needs of the labor market;
 - Encourage entrepreneurship, including through the introduction of self-employment as a profession among students, as well as providing various incentives for MSMEs;
 - Encourage equitable migration, including by building new regional growth centers and encouraging village economic development to prevent urbanization.

Thank you.

Session 5: Update on Energy Markets and Trends

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- At present, the global energy market is experiencing uncertainty that is influenced by a variety of factors, including the transition to renewable energy, fluctuations in global oil prices, and geopolitical tensions.
- Indonesia, the 16th largest economy in the globe and the most populous country in Southeast Asia, is also experiencing an increasing demand for energy.
- As strategy, Indonesia is adapting to the global energy market by prioritizing the diversification of energy sources, including the use of natural gas, the transition to renewable energy, and energy efficiency.
- In accordance with its climate action commitments to reduce emissions and promote the use of cleaner, more sustainable, and environmentally benign energy, Indonesia is dedicated to the further integration of renewable energy into the national energy system and the management of fluctuations in renewable energy supply.
- At present, the New and Renewable Energy (EBT) Bill is under consideration in the House of Representatives. This bill has been included in the prioritized National Legislation Program (*Prolegnas*) and seeks to align Indonesia's energy sector with sustainable principles while promoting the development and implementation of renewable energy sources.
- International cooperation is crucial for the successful functioning of the energy market. It will be instrumental in facilitating energy transition by collaborating with the international organization like the OECD, for instance, by:
 - Increasing access to renewable energy technologies and exchanging information on successful energy transition policies in other countries.
 - Clean energy initiatives and transition infrastructure are supported by green financing and other financing innovations.
 - Technical assistance in the development of sustainable energy policies and the promotion of low-carbon economic growth.

Thank you.

Session 6: Competition Policy

Honorable Chair,

Honorable Delegates,

Ladies and gentlemen.

Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- As a result of the global market deregulation, privatization, and liberalization, it is imperative for countries to establish a competition policy to monitor and regulate the increasing influence of the private sector in the economy.
- This will prevent the replacement of public monopolies with private monopolies and safeguard the rights of business and consumers.
- A robust competition framework and effective enforcement are critical for achieving an inclusive global economy, ensuring equitable access to its benefits for all individuals.
 - The competition framework and enforcement must offer protection, particularly for MSMEs, youth, and women.
- The digital era has significantly transformed the global economy, particularly through the concentration of control and key players in the technology market by large tech companies. If left unregulated, this trend may exacerbate economic inequality and widen the digital divide.
 - A global discourse and multilateral process are necessary to establish a framework for business competition concerning the role of big tech in the economy, particularly to ensure the significant participation of developing countries and MSMEs in the global economy.
- Indonesia is committed to create healthy market environment where more people can afford to buy products, business can sustain and flourished, and boost the national economy.
 - Indonesia provides a legal framework related to competition policy developed through the Business Competition Law (Law No. 5 of 1999), which was subsequently amended by the Job Creation Law No. 6 of 2023.
- Furthermore, enhancements in international cooperation regarding business competition are necessary.
 - This includes standardizing the enforcement capacity of business competition law through technical assistance and capacity building, as well as fostering collaboration in the enforcement of cross-border competition law.

I thank you.



OECD Global Parliamentary Network 2025
Paris – Perancis, 5 – 7 Februari 2025

Suggested Point of Intervention:

**The House Representatives of
The Republic of Indonesia**

DAY 3

Friday, 7 February 2025

Special Session on Accession

Honorable Chair,
Honorable Delegates,
Ladies and gentlemen.
Good morning/afternoon.

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today

Ladies and Gentlemen,

- Following the approval of Indonesia's accession application at the OECD Council Meeting on 20 February 2024, the government has implemented various measures to further Indonesia's accession process in the OECD.
- The President of the Republic of Indonesia, President Prabowo Subianto, conveyed Indonesia's commitment to continue the accession process to the OECD.

- Indonesia steadily implemented reforms across multiple sectors to align with OECD norms, encompassing green energy securities, food security, digitization, and other priority areas.
- We in the parliament, also want to reiterate our parliamentary support in the implementation of Indonesia's Accession Roadmap.
- We realize that parliament has pivotal role to play in this accession. Especially, in the formulation of regulations and legislative framework which are aligned with OECD recommendations and our national agenda and capacity.
- As constructive partner of the government, we are of the view that parliament should be involved from the early stage of legal formulation.
- In this special session on accession, we hope that we can exchange and learn of the best practices and experiences of the accession process in each country.

Thank you.

Informasi Terkait Proses Aksesi Indonesia

1. Pada tanggal 14 Juli 2023, Pemri mengajukan permohonan aksesi sebagai anggota OECD melalui surat Menko Perekonomian kepada Sekretaris Jenderal OECD.
2. Permohonan aksesi Indonesia disetujui dalam Pertemuan Dewan OECD pada tanggal 20 Februari 2024.
 - ➔ Surat dari Sekjen OECD kepada Presiden RI menyampaikan persetujuan Pertemuan Dewan OECD pada tanggal yang sama.
3. Tanggal 2-3 Mei 2024, Menko Perekonomian, didampingi Menteri Keuangan secara resmi menerima *Accession Roadmap* (Peta Jalan Aksesi) Indonesia di OECD dari Sekjen OECD saat pelaksanaan OECD *Ministerial Council Meeting /MCM*.
4. Sesuai *best practice* yang berlaku, setelah peluncuran Peta Jalan Aksesi, Indonesia masih akan melalui beberapa tahapan:
 - a. *Initial Memorandum*
 - Indonesia diberikan waktu untuk melakukan *self-assessment* terhadap hal-hal yang tertuang dalam Peta Jalan Aksesi;
 - Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara kandidat aksesi lain seperti Brazil dan Kosta Rika, diperlukan waktu kurang lebih 1 tahun untuk melakukan penyusunan *self-assessment* dimaksud;
 - Apabila *self-assessment* telah selesai dilakukan, Pemri dapat menandatangani *Initial Memorandum*;
 - b. *Technical Committee Reviews*
 - Berbagai Komite di OECD akan melakukan kajian terhadap regulasi dan kebijakan Pemri dalam berbagai sektor sesuai portfolio OECD;
 - Sesuai Peta Jalan Aksesi, terdapat 26 Komite yang akan melaksanakan review dengan Indonesia selama proses aksesi;
 - Hal-hal yang dikaji oleh berbagai Komite tersebut meliputi evaluasi, baik kebijakan politis maupun regulasi Pemri, agar sesuai dengan standar OECD.
 - Proses kajian ini memakan waktu karena diperlukan penyesuaian regulasi domestik untuk memenuhi standar OECD.
 - c. *Committee Recommendations*
 - Dari waktu ke waktu, Komite akan melakukan kajian terhadap perubahan regulasi dan kebijakan, serta kesiapan Pemri untuk menyesuaikan diri dengan standar dan prinsip OECD;
 - Hasil kajian Komite akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
 - d. *Formal Opinion*
 - Apabila hasil kajian dipandang baik dan telah sejalan dengan standar OECD, Komite dapat memberikan *formal opinion* kepada Dewan OECD mengenai kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan OECD.
 - e. *Council Decision on Membership*
 - Dewan OECD, berdasar *formal opinion* dari berbagai Komite, dapat memutuskan diterima atau tidaknya Indonesia sebagai anggota OECD.

f. *Accession Agreement*

- Apabila Dewan OECD memutuskan untuk menerima Indonesia sebagai anggota OECD, Pemri dapat menandatangani *Accession Agreement* dengan OECD, diikuti dengan prosedur aksesi perjanjian internasional pada umumnya, seperti deposit instrumen dan pengesahan di dalam negeri.
- Setelah resmi menjadi anggota, Indonesia akan dikenai kontribusi keanggotaan yang besarnya akan ditentukan berdasar tingkat GDP.

Perkembangan Proses Aksesi

5. Setelah Indonesia menerima Peta Jalan Aksesi, Pemri telah melakukan beberapa langkah menindaklanjuti proses aksesi Indonesia di OECD.
 - a. Presiden Joko Widodo menetapkan Keppres No. 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia Dalam OECD, untuk mempersiapkan dan mendorong proses aksesi Indonesia ke OECD.
 - ➔ Tim Nasional dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan didukung oleh dua wakil: Menkeu dan Menlu.
 - b. Selanjutnya, Menko Perekonomian mengeluarkan Keputusan No. 232 Tahun 2024, menetapkan pembagian tanggung jawab dalam Tim Nasional dan menunjuk Menteri / Kepala Lembaga terkait yang bertanggung jawab atas isu-isu, sesuai dengan Komite terkait di OECD.
 - ➔ Pembagian kerja memastikan adanya delegasi tanggung jawab yang jelas dan efisien dalam proses aksesi.
 - c. Pemri juga lakukan langkah strategis terkait aksesi OECD, antara lain melalui integrasi aksesi OECD dalam RPJPN dan RPJMN serta pembentukan *Project Management Office* (PMO) untuk mendukung Tim Nasional OECD.
 - d. Kemenko Perekonomian juga telah membuat Portal Aksesi OECD, untuk :
 - ➔ mendokumentasikan proses aksesi Indonesia,
 - ➔ memberikan informasi mengenai proses perkembangan tinjauan yang dilakukan oleh masing-masing Komite, undangan dan dokumen terkait pertemuan yang akan diselenggarakan,
 - ➔ sampaikan laporan dari setiap K/L yang menghadiri pertemuan terkait aksesi.
 - e. Saat ini, Tim Nasional tengah bekerja sama secara terintegrasi dengan K/L terkait agar *Initial Memorandum* dapat diselesaikan sesegera mungkin.
 - ➔ Kemenko Perekonomian telah mengadakan pertemuan awal lintas Lembaga guna pastikan semua substansi *Initial Memorandum* selaras dengan tujuan kebijakan Indonesia.
 - ➔ Menko Perekonomian telah memberikan arahan agar Tim Nasional dapat segera selesaikan *Initial Memorandum*.
6. Dalam rangka mendukung proses aksesi Indonesia, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, telah 2 kali melakukan kunjungan ke Indonesia pasca penyerahan Peta Jalan.
7. Kunjungan pertama pada tanggal 27 – 29 Mei 2024 untuk melakukan peluncuran Peta Jalan Aksesi Indonesia di OECD, dan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Bogor, 28 Mei 2024.

8. Kunjungan kedua dilakukan setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, pada tanggal 24 – 28 November 2024.
 - a. Tanggal 26 November 2024, Sekjen OECD meluncurkan *2024 Indonesia Economic Survey*, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI.
 - ➔ *2024 Indonesia Economic Survey* merupakan survei ekonomi ke-8 yang diselenggarakan OECD dan Kemkeu RI sejak tahun 2007.
 - ➔ Dua tema besar yang diangkat adalah mengenai ekonomi digital dan transisi hijau.
 - ➔ Survei terbagi dalam 4 bab yang membahas: 1) kebijakan makroekonomi; 2) konvergensi sosial-ekonomi; 3) digitalisasi; dan 4) transisi hijau.
 - ➔ Hasil survei tersebut menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan daya tahan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global.
 - ➔ Pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan sebesar 5,1% pada 2024 dan 5,2% pada 2025.
 - ➔ Dengan inflasi terkendali di 1,71% per Oktober 2024 dan surplus perdagangan selama 54 bulan berturut-turut menjadi indikator kuatnya fundamental ekonomi Indonesia.
 - b. Tanggal 27 November 2024, Sekjen OECD bertemu dengan Menko Perekonomian
 - ➔ Menko Perekonomian didampingi oleh Wamen Bappenas, Deputi Bidang Perekonomian Bappenas, Deputi Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi /BKPM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemenlu, dan Sekjen KLHK.
 - ➔ Pertemuan membahas langkah ke depan yang perlu dilakukan Pemri dalam proses aksesi, yaitu koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan *Initial Memorandum* untuk melihat posisi regulasi di Indonesia *vis-à-vis* standar OECD.
 - c. Tanggal 28 November 2024, Sekjen OECD diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.
 - ➔ Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menko Perekonomian, Menlu, dan Menkeu.
 - ➔ Dalam pertemuan, Presiden RI sampaikan komitmen untuk melanjutkan proses aksesi di OECD, sementara Sekjen OECD menyampaikan kembali berbagai manfaat yang dapat diperoleh Indonesia jika menjadi anggota OECD.
 - d. Lebih lanjut, komitmen Indonesia untuk melanjutkan proses aksesi OECD ditegaskan oleh Menlu RI, terutama pada dua kesempatan:
 - ➔ pernyataan Menlu RI saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR-RI, tanggal 2 Desember 2024; dan
 - ➔ Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) Tahun 2025, tanggal 10 Januari 2025

Kesiapan dan Manfaat Indonesia menjadi Anggota OECD

9. OECD adalah forum yang secara reguler melakukan kajian atas berbagai tantangan dalam pembangunan ekonomi, melalui pertukaran pengalaman dan perumusan solusi atas dasar praktik terbaik atau *best practices*.

- ➔ Selama lebih dari 50 tahun menjadi sumber utama analisis kebijakan berbasis bukti dan data ekonomi yang diandalkan
 - ➔ dapat ditarik kesimpulan adanya korelasi positif antara tingkat pendapatan nasional dan per kapita yang tinggi dengan penerapan *best practices policies*
10. Indonesia mewakili kawasan Asia Tenggara yang dikenal memiliki rekam jejak pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas politik sangat baik.
- ➔ keanggotaan Indonesia akan memberikan nilai tambah, baik secara politis maupun substantif, bagi OECD untuk menjadi organisasi yang makin relevan dan lebih universal
 - ➔ bagi Indonesia, keanggotaan dalam OECD akan memberi peluang keikutsertaan dalam pembahasan dan proses penyusunan norma dan standard yang akan diterapkan oleh berbagai negara
11. Secara umum, regulasi dan kebijakan Indonesia pada tiga sektor (investasi, ketenagakerjaan, serta antikorupsi) telah cukup selaras dengan standar OECD. Namun, implementasi kebijakan masih memerlukan optimalisasi agar sejalan dengan standar internasional.
12. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam hal kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing, yang saat ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia (*Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*).
- ➔ Menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk memenuhi standar OECD dalam upaya pemberantasan korupsi trans-nasional.
13. Analisis dampak sosial-ekonomi mengindikasikan bahwa aksesi ke OECD berpotensi memberikan manfaat positif bagi Indonesia.
- ➔ Secara umum di banyak negara yang melakukan aksesi, terlihat indikasi peningkatan arus masuk investasi asing langsung (FDI) dan keterbukaan perdagangan pasca-aksesi.
 - ➔ Namun, kenaikan FDI ini membutuhkan waktu dan tidak signifikan terlihat dalam jangka pendek.
14. Data juga menunjukkan adanya potensi peningkatan daya saing, terutama dalam aspek kesiapan teknologi setelah suatu negara bergabung dengan OECD.
15. Peningkatan signifikan juga terlihat dalam pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (research and development, R&D), yang krusial untuk inovasi dan daya saing ekonomi.
16. Hal penting lainnya yang juga menjadi fondasi penting pertumbuhan ekonomi adalah perbaikan institusi.
- ➔ Negara-negara yang telah bergabung dalam OECD menunjukkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan upaya antikorupsi
 - ➔ Perbaikan institusional cenderung bersifat permanen.
17. Pengalaman Korea Selatan sejak bergabung dalam OECD pada 1996 dapat juga dijadikan pelajaran atau catatan berharga.
- ➔ Pada saat itu, pendapatan per kapita Korsel sebesar 14.694 dollar AS (sementara pendapatan per kapita OECD adalah 20.840 dollar AS).

- ➔ Sementara tahun 2006, atau dalam kurun 10 tahun, angka tersebut naik menjadi 21.743 dollar AS, kemudian melonjak menjadi 29.280 dollar AS di tahun 2016. Pada 2022, pendapatan per kapita Korsel telah mencapai 32.422 dollar AS.
 - ➔ Selain PDB per kapita yang naik tinggi, indikator umum negara maju juga dicapai Korsel di sektor pertanian, ekonomi, pendidikan, energi, lingkungan hidup, sosial, penyediaan lapangan kerja, kesehatan, dan keuangan.
 - ➔ Kekayaan terdistribusi cukup merata di kalangan penduduknya, dengan rasio gini 0.333 pada 2020. Artinya, kesenjangan pendapatan tidak begitu lebar di Korsel, bahkan jika dibandingkan dengan negara OECD lainnya (data Bank Dunia).
18. Memperhatikan beberapa indikator tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh Indonesia, antara lain:
- ➔ harmonisasi regulasi domestik dengan standar OECD, terutama dalam hal penyuapan transnasional, perlu diprioritaskan;
 - ➔ fokus implementasi kebijakan dan penguatan kapasitas institusi harus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas reformasi;
 - ➔ peningkatan investasi dalam infrastruktur digital dan program pelatihan diperlukan untuk memfasilitasi akses yang lebih baik ke layanan publik online.
 - ➔ Pemerintah perlu memperhatikan lebih detail terkait regulasi lingkungan di Indonesia. Dalam beberapa indikator, terlihat bahwa standar kebijakan lingkungan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan norma OECD.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral

Jl. Taman Pejambon No. 6

Jakarta Pusat 10110

E. direktorat.pelh@kemlu.go.id

T. (6221) 344 1508

F. (6221) 384 9410

W. kemlu.go.id

Jakarta, 17 Januari 2025

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bahan Masukan untuk Pertemuan *OECD Global Parliamentary Network* di Paris, Prancis, 5-7 Februari 2025

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat RI
di
Jakarta

Merujuk surat Sekretaris Jenderal DPR-RI No. B/15790/KS/01.01/12/2024 perihal pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahan masukan untuk Delegasi DPR-RI yang akan menghadiri pertemuan *OECD Global Parliamentary Network*, yang akan diselenggarakan di Paris, Prancis, pada tanggal 5-7 Februari 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan
Lingkungan Hidup

Tri Purnajaya

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral (sebagai laporan)

Bahan Masukan Partisipasi DPR RI pada OECD Global Parliamentary Network
Paris, 5-7 Februari 2025

Agenda *Climate Adaptation and Resilience*

1. Perkembangan Aksi Adaptasi Iklim dan Ketahanan Iklim Indonesia

- Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, telah mengakui pentingnya upaya adaptasi untuk membangun ketahanan iklim.
- Dengan perubahan pola cuaca yang semakin ekstrem, peningkatan permukaan laut, serta ancaman terhadap sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata,
- Bagi Indonesia, aksi mitigasi perlu terus diseimbangkan dengan adaptasi untuk melindungi masyarakat, ekonomi, dan ekosistem.

2. Kerangka Kebijakan Nasional untuk Adaptasi Iklim

- Indonesia telah mengembangkan sejumlah kebijakan dan rencana aksi untuk mengurangi kerentanannya terhadap perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan adalah Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang pertama kali disusun pada tahun 2014.
- RAN-API memberikan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan adaptasi iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan sektoral.
- Selanjutnya, Indonesia juga mengembangkan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) di sejumlah provinsi untuk memastikan kebijakan adaptasi diterapkan sesuai dengan konteks lokal dan tantangan yang dihadapi masing-masing daerah.
- Dalam kerangka ini, Indonesia berfokus ke enam sektor utama yang rentan terhadap perubahan iklim yakni (i) pertanian dan ketahanan pangan; (ii) perikanan dan kelautan; (iii) kesehatan; (iv) sumber daya air; (v) infrastruktur dan pemukiman; (vi) ekosistem dan biodiversitas.

3. Adaptasi di Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Sektor pertanian adalah salah satu sektor paling terpengaruh oleh perubahan iklim di Indonesia.
- Cuaca ekstrem, seperti kekeringan dan banjir, mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
- Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim, seperti:
 - Peningkatan teknologi pertanian yang tahan terhadap iklim ekstrem, misalnya dengan mengembangkan varietas padi yang tahan kekeringan.
 - Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, seperti sistem irigasi yang efisien dan pengembangan teknik konservasi tanah.
 - Pelatihan petani untuk meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.

4. Ketahanan Pesisir dan Wilayah Kepulauan

- Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, memiliki banyak wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap naiknya permukaan laut dan badai tropis.
- Adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di wilayah pesisir menjadi prioritas Indonesia, dengan beberapa langkah yang telah diambil antara lain:
 - Restorasi mangrove untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang tinggi.
 - Pembangunan infrastruktur ketahanan pesisir, i.e. tanggul laut & sistem peringatan dini.

- Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim melalui pelatihan dan penguatan jejaring sosial.

5. Sektor Kesehatan dan Perlindungan Masyarakat

- » Perubahan iklim juga memengaruhi sektor kesehatan, dengan meningkatnya risiko penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti nyamuk, serta ancaman dari gelombang panas dan bencana alam.
- » Indonesia telah mengembangkan kebijakan adaptasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, yang mencakup:
 - Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyakit terkait iklim, seperti malaria dan DBD.
 - Penyuluhan kesehatan masyarakat mengenai dampak perubahan iklim dan langkah-langkah untuk melindungi diri.
 - Penguatan sistem kesehatan masyarakat untuk meningkatkan respons terhadap bencana alam yang semakin sering terjadi.

6. Ketahanan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati

- » Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia telah melakukan berbagai upaya adaptasi iklim di sektor ekosistem dan keanekaragaman hayati, antara lain:
 - Restorasi ekosistem yang rusak akibat deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, termasuk restorasi hutan dan lahan gambut.
 - Konservasi keanekaragaman hayati dengan menciptakan kawasan lindung yang lebih luas dan memperkuat pengelolaan taman nasional.
 - Penyuluhan kepada masyarakat adat dan lokal untuk menjaga keberlanjutan ekosistem yang mereka kelola secara tradisional.

7. Peran Parlemen dalam Aksi Adaptasi Iklim

- » Parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aksi adaptasi iklim melalui pembuatan undang-undang dan kebijakan yang mendukung pencapaian ketahanan iklim, termasuk dalam hal:
 - Mendorong pengesahan undang-undang yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengurangan kerentanannya terhadap perubahan iklim.
 - Memastikan bahwa anggaran negara untuk adaptasi iklim dialokasikan secara memadai dalam anggaran pembangunan tahunan.
 - Mendorong peran pengawasan dalam memastikan bahwa kebijakan adaptasi iklim diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

8. Kerja Sama dengan Organisasi Internasional, termasuk OECD

- » Indonesia membutuhkan dukungan internasional dalam hal teknologi, pembiayaan, dan kapasitas untuk mengimplementasikan aksi adaptasi iklim.
- » Kerja sama dengan OECD akan berperan penting dalam menyediakan panduan kebijakan, berbagi pengetahuan, dan memfasilitasi aliran pendanaan yang diperlukan untuk membangun ketahanan iklim.
- » OECD juga dapat membantu Indonesia dalam memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat pemerintah daerah dalam hal merancang dan mengimplementasikan kebijakan adaptasi iklim yang lebih efektif.

9. Rekomendasi:

- Penekanan komitmen Indonesia untuk perkuat aksi adaptasi iklim dan membangun ketahanan iklim, dengan melibatkan semua sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta.
- Melalui kebijakan yang terintegrasi, legislasi yang mendukung, serta kolaborasi internasional, Indonesia berusaha untuk mengurangi kerentanannya terhadap dampak perubahan iklim dan memastikan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua.
- Dorongan bagi OECD menggalang dukungan internasional di berbagai bidang, baik untuk kebijakan yang lebih baik ataupun peningkatan kapasitas lewat *sharing experience and best practices*, ataupun dalam menggalang investasi, pembiayaan dan alih teknologi.

Agenda Climate Mitigation and Net-Zero Transition

1. Komitmen Indonesia terhadap Perubahan Iklim dan Net-Zero

- 🎬 Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap *Paris Agreement* dengan target penurunan emisi sesuai *Updated NDCs* yang disampaikan September 2023 sebesar 29% pada 2030 dengan usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional.
- 🎬 Indonesia berencana mengajukan *Second NDCs* pada 2025 yang memuat target baru penurunan emisi, sejalan dengan semangat membatasi kenaikan temperatur bumi pada ambang batas 1,5 derajat Celcius.
- 🎬 Dalam mencapai target dimaksud, Indonesia berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan emisi, termasuk melalui percepatan adopsi teknologi rendah karbon dan memperbaiki infrastruktur energi.

2. Aksi Mitigasi Iklim di Sektor Energi

- 🎬 Sektor energi di Indonesia merupakan salah satu penyumbang emisi besar, sehingga transisi energi menjadi kunci dalam upaya mitigasi iklim Indonesia.
- 🎬 Indonesia akan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, geothermal, dan air.
 - Indonesia menargetkan 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025, dan 31% pada tahun 2050.
 - Peningkatan infrastruktur yang mendukung penggunaan energi terbarukan, seperti *smart grids* yang dapat mengintegrasikan energi terbarukan secara lebih efisien.
 - Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi energi, serta mengantikan sebagian penggunaan batubara dengan gas alam cair (LNG) yang lebih rendah emisi.

3. Mendorong Transportasi Rendah Karbon

- 🎬 Pemerintah Indonesia telah menetapkan target 20% kendaraan listrik pada 2025 dan mengimplementasikan kebijakan untuk mendorong infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik serta berbagai insentif untuk kendaraan listrik.
- 🎬 Jakarta dan beberapa kota besar lainnya telah mulai mengimplementasikan bis listrik dan kereta listrik, sebagai bagian dari transisi menuju transportasi rendah karbon.

4. Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- 🎬 Sektor pertanian dan kehutanan di Indonesia juga memiliki peran besar dalam aksi mitigasi iklim, baik melalui pengurangan emisi maupun penyerapan karbon.
- 🎬 Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dampak deforestasi, termasuk melalui restorasi lahan gambut dan menghentikan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan.
- 🎬 Pemerintah Indonesia mendorong penerapan praktek pertanian berkelanjutan dan *agroforestry* yang ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon sektor pertanian, melalui penggunaan pupuk organik dan pengelolaan lahan secara lebih efisien.

5. Aksi Mitigasi di Sektor Industri

- 🎬 Tengah didorong peningkatan efisiensi energi di sektor industri, seperti semen, tekstil, dan pengolahan minyak sawit melalui pemanfaatan teknologi untuk proses produksi yang lebih rendah karbon.
- 🎬 Industri-industri juga diarahkan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan menerapkan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik.

6. Peran Parlemen dalam Transisi Net-Zero

■ Parlemen Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat transisi menuju *net-zero emissions*:

- Memastikan bahwa kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim, termasuk pengurangan emisi, pengembangan energi terbarukan, dan teknologi bersih, diintegrasikan secara menyeluruh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPP).
- Mendukung proses penyediaan insentif dan pendanaan transisi energi melalui berbagai mekanisme pembiayaan inovatif.
- Memonitor implementasi kebijakan mitigasi dan memastikan bahwa Indonesia *on track* dalam pengurangan emisi.

7. Kerja Sama Internasional

■ Transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan kerja sama internasional yang baik, termasuk dengan OECD. Beberapa area kerja sama yang dapat diperkuat antara Indonesia dan OECD adalah:

- Pemanfaatan Teknologi Hijau: berbagi pengetahuan dan teknologi inovatif untuk membantu Indonesia mengurangi emisi dari sektor industri, energi, dan transportasi.
- Pembiayaan Berkelanjutan: mendorong aliran investasi internasional ke proyek-proyek mitigasi iklim melalui *green bonds* dan *sustainability-linked financing*.
- Pengembangan Kebijakan: membantu Indonesia dalam merancang kebijakan yang efektif dan berbasis bukti untuk mendukung transisi energi dan mitigasi iklim.

Agenda Consultation on the OECD Development Strategy

1. OECD tengah melakukan penyusunan Strategi Baru OECD tentang Pembangunan (*OECD New Strategy on Development*), yaitu sebuah dokumen yang pertama kali diadopsi pada tahun 2012 guna memberikan kontribusi untuk pembangunan global.
 - OECD bukanlah Lembaga pemberi pinjaman seperti IMF atau World Bank, namun memiliki potensi untuk memberikan bantuan teknis, memproduksi data dan survei, dan memberikan rekomendasi untuk isu-isu yang menjadi prioritas dalam pembangunan global;
 - Bantuan yang ditawarkan oleh negara pemberi bantuan seringkali belum tentu memadai atau sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan negara berkembang;
 - Dalam penyusunan Strategy on Development kali ini, OECD bermaksud menjaring masukan mengenai kebutuhan dari negara-negara berkembang.
 - Dokumen ini rencananya akan diadopsi pada Pertemuan Dewan OECD (MCM) tahun 2025.
2. Beberapa negara non-OECD sampaikan masukan sebagai berikut:
 - Beberapa sektor utama perlu diberi perhatian khusus, seperti transisi energi, dan green economy, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital.
 - Strategi baru OECD seharusnya dapat menanggulangi tantangan global yang saling terkait.
 - Isu transfer teknologi juga disorot sebagai faktor penting,
 - Negara-negara tekanan pentingnya inklusi sosial dan upaya mengatasi ketidaksetaraan serta segala bentuk diskriminasi.
 - Mobilisasi pembiayaan dari sektor swasta ditekankan sebagai hal yang krusial, sekaligus menekankan peran penting pembiayaan publik dan tantangan besar dalam membiayai investasi publik di tengah tingginya biaya pinjaman.
3. Pada berbagai level, Indonesia sampaikan masukan dan pandangan Indonesia terhadap penyusunan OECD Strategy on Development, sebagai berikut:
 - Strategi baru harus menggunakan SDGs sebagai rujukan utama;
 - Perlunya menyusun Strategi baru yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kawasan dan tidak one-size-fits-all;
 - Menekankan pentingnya negara berkembang diberikan akses yang setara kepada dukungan teknis dan knowledge sharing;
 - Strategi OECD diharapkan dapat juga memperhatikan kebutuhan masing-masing negara dan memperhatikan kapasitas nasional emerging economies;
 - Bagi Indonesia, strategi pembangunan tidak hanya tentang peningkatan PDB, tetapi juga untuk memperbaiki kebijakan untuk menjadi negara maju. Dengan demikian, Indonesia perlu memastikan pembangunan terfokus pada kesejahteraan masyarakat.
 - Indonesia juga prioritaskan investasi hijau guna mendorong target pertumbuhan ekonomi, yang dilakukan paralel dengan komitmen tinggi terhadap kepatuhan standar lingkungan. Karena itu, diperlukan harmonisasi untuk menyeimbangkan keduanya.

Agenda Skills for Changing World – The OECD Survey of Adult Skills

Latar Belakang

1. OECD melakukan *Survey of Adult Skills* (2022) terhadap 31 negara anggota untuk menilai tingkat kemampuan penduduk dewasa di bidang literasi, numerasi, dan pemecahan masalah, sebagai kemampuan dasar bagi pembangunan individu, ekonomi, dan sosial.
 - ① Hasil survei menunjukkan bahwa investasi yang besar di bidang pendidikan dan pelatihan *skilling-upskilling-reskilling*, tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat keahlian penduduk dewasa. Negara-negara dengan penduduk berkinerja tinggi meliputi Singapura, Finlandia, Jepang, Belanda, Norwegia, dan Swedia. Sedangkan 14 negara masuk dalam penilaian berkinerja rendah a.l. Lithuania, Portugal, dan Chile;
 - ② Survei tekankan pentingnya penerapan kebijakan *lifelong and life-wide learning*, memastikan pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan.
2. Dalam konteks *International Labour Organization* (ILO), topik terkait pentingnya *skill and lifelong learning* telah dimuat di berbagai dokumen seperti *the ILO Centenary Declaration for the Future of Work 2019*, dan *the ILO Global Call to Action for a Human -Centred Recovery from the COVID-19 Crisis*.
3. Pada Sesi ke 109 *International Labour Conference* (ILC), telah diadopsi *the ILO Strategy on Skills and Lifelong Learning for 2022–30*, memuat antara lain: (i) perlunya penguatan dan transformasi pengembangan *skill and lifelong learning* yang relevan, inklusif, dan berketahanan; (ii) dorongan kepada Pemerintah untuk kembangkan kebijakan pengembangan *skills and lifelong learning*; (iii) dorongan kepada ILO untuk membantu seluruh mitra sosial dalam mengembangkan, dan memperkuat pembangunan *skill and lifelong learning* yang inklusif, responsif, dan berketahanan.

Perkembangan di Indonesia

4. Indonesia telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 ditandai peningkatan status Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah atas. Guna mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong keberlanjutan pengembangan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang kompeten, memanfaatkan bonus demografi dalam 10 tahun ke depan.
 - ① Pembangunan manusia melalui pendidikan telah menjadi prioritas Pemerintah yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, serta Asta Cita 3 (meningkatkan lapangan kerja berkualitas) dan Asta Cita 4 (pembangunan SDM);
 - ② Strategi pengembangan SDM diarahkan untuk memastikan kesesuaian strategi pengembangan keterampilan dengan Revolusi Industri 4.0.
5. Ketimpangan keterampilan dan kekurangan tenaga kerja berkeahlian merupakan salah satu tantangan dalam pencapaian visi Indonesia Emas yang antara lain disebabkan oleh:
 - a. Kurikulum dan kualitas pendidikan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja;
 - b. Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang terbatas untuk menjalankan pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan permintaan industri;
 - c. Lapangan kerja yang tidak inklusif bagi penyandang disabilitas, dan lansia produktif (>60 tahun).

6. Sejumlah kebijakan telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut meliputi berbagai kebijakan *Lifelong Learning* yang bersifat lintas sektor, antara lain:

a. **Penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2025-2045**

④ Memuat 7 arah kebijakan, salah satunya mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui pendidikan vokasi, meliputi : (i) penguatan keterampilan dasar literasi, numerasi, dan vokasi; (ii) penguatan skema pemagangan; dan (iii) penguatan keterampilan vokasi dan kewirausahaan bersertifikasi.

b. **Program Kartu Prakerja**

④ Ditujukan bagi para Pencari Kerja, Pekerja/Buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi;
④ Bertujuan: (i) mendorong peningkatan keterampilan kerja; (ii) meningkatkan produktivitas dan daya saing; serta (iii) mengembangkan kewirausahaan;
④ Telah membantu lebih dari 17 juta orang sejak diluncurkan pada 2020;
④ Merupakan peluang untuk *skilling, upskilling* dan *reskilling*.

c. **Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Perpres No.68/2022).**

④ Bertujuan meningkatkan mutu pendidikan vokasi dalam menciptakan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing, yang dibutuhkan pasar kerja namun juga mampu berwirausaha;
④ Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan di seluruh jenjang vokasi, dari tingkat SMK hingga perguruan tinggi;
④ Mendorong peran dan tanggung jawab kepada Pemerintah, dunia usaha dan industri dalam menciptakan SDM tenaga kerja Indonesia yang berkualitas;
④ Lingkup revitalisasi pendidikan vokasi meliputi: (i) perancangan sistem informasi pasar kerja; (ii) pendidikan vokasi berbasis *link-and-match*; (iii) pelatihan dan kursus berbasis kompetensi, *future job, skillling, upskilling* dan *reskilling*; (iv) penjaminan mutu melalui sertifikat kompetensi dan akreditasi sertifikat lulusan;
④ Salah satu program yang dijalankan Pemerintah adalah program pelatihan vokasi berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan untuk UMKM dan sektor informal. Program ini menjadi salah satu rekomendasi Indonesia yang disampaikan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

d. **Peluncuran Strategi Nasional Kelanjutusiaan (*Silver Economy*) untuk mewujudkan Lansia Produktif dan Sejahtera (Perpres No. 88/2021).**

④ Angka harapan hidup Indonesia saat ini mencapai 72 tahun, dan struktur demografi mulai mengarah kepada struktur penduduk tua pada 2045 (*aging population*);
④ Indonesia diprediksi menjadi negara ketiga *silver economy* terbesar di dunia setelah Jepang dan RRT, dengan jumlah mencapai lebih dari 60 juta pada 2045 (20% populasi);
④ Peran lansia produktif sangat penting dalam mendukung pembangunan *silver economy*. Dhi Perpres bertujuan membangun kebijakan yang efektif, inklusif, dan lintas sektoral menghadapi *aging population*;
④ Penyusunan Perpres oleh Kemenko PMK bertujuan mendorong program-program K/L yang mendukung *silver economy* dan mengoptimalkan bonus demografi a.l. melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, pelindungan sosial yang adaptif, serta reformasi sistem pensiun.

Rekomendasi:

1. Penguatan peran dan kerja sama parlemen dalam mendorong penyusunan aturan yang mendukung produktivitas secara efektif, inklusif, dan lintas sektoral, khususnya *lifelong learning* sebagaimana rekomendasi/panduan ILO.
2. Penyampaian *best practice* Kartu Prakerja dan pelatihan vokasi berbasis komunitas dalam meningkatkan mutu pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang inklusif di Indonesia.

Agenda Governing with AI dan AI in Work, Innovation, Productivity and Skills

Perkembangan umum

1. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berdasarkan Permenkomdigi No. 1 Tahun 2025 telah resmi membentuk **Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru (DKAETB)** di bawah Direktorat Jenderal Ekosistem Digital.
 - a. Direktorat ini memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kecerdasan artifisial dan ekosistem teknologi baru, termasuk terkait **interoperabilitas, digitalisasi sektor prioritas, dan uji coba di ruang terbatas/lingkungan terisolasi (sandbox)**.
 - b. Pembentukan DKAETB ini mengindikasikan **peran sentral** Komdigi bukan hanya pada **teknologi baru (emerging technologies)** namun khususnya juga pada **kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI)**, termasuk pada *sandbox regulatory* maupun implementasi AI.
 - c. Kemenkomdigi juga telah membentuk **Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital**, yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam **perumusan strategi dan pelaksanaan kebijakan, infrastruktur, aplikasi pemerintah, dan akseleksi implementasi teknologi pemerintah digital**.
2. Kemenkomdigi telah mengindikasikan perubahan dan/atau prioritas kebijakan AI nasional, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Arahan Presiden yang menekankan perlunya digitalisasi layanan publik dalam rangka meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, juga percepatan transformasi digital di instansi pemerintah, dalam rangka reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik.
 - b. Kemenkomdigi mengindikasikan perlunya pengaturan lebih rinci mengenai AI seperti terkait *engine technologies* dalam kerangka UU PDP maupun pendekatan kolaboratif bersama K/L lain untuk isu-isu tertentu seperti pemanfaatan teknologi AI untuk kesehatan dan pendidikan serta aspek hak cipta dari AI.
 - c. Kemenkomdigi tengah mempersiapkan aturan terkait AI di tingkat peraturan (kemungkinan berbentuk Peraturan Menteri) yang diperkirakan akan selesai dalam 3 bulan ke depan.
 - ☞ Sementara peraturan tersebut masih dalam penyusunan, **Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Etika AI** menjadi pedoman **penyelenggara sistem elektronik (PSE)** yang menggunakan kecerdasan artifisial, baik lingkup publik (pemerintahan) maupun privat (swasta).
 - ☞ Terdapat **nilai-nilai etika AI** yang perlu diperhatikan oleh PSE, yaitu inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, pelindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, serta **kekayaan intelektual**.
 - d. Kemenkomdigi telah menyusun Lima Prioritas Vertikal Utama Strategi *Artificial Intelligence (AI) Nasional* untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam berbagai sektor penting, yang mencakup **layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, smart cities mobility, dan keamanan pangan**.
3. Pemri baru saja menyelesaikan penilaian kesiapan AI UNESCO, sebagai tindak lanjut berdasarkan *UNESCO Recommendation on the Ethics of AI*.
 - a. Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan penilaian ini dan dinilai menjadi salah satu *leading country* dalam menciptakan tata kelola AI yang etis.¹

¹ Vide ND 44241/TI/10/2024/51 perihal Laporan Kegiatan Artificial Intelligence (AI) Readiness Assessment

- b. Laporan tersebut menyoroti beberapa hal penting, antara lain pergeseran lapangan kerja terutama di pedesaan, kesenjangan akses informasi dan penelitian AI di Indonesia yang tertinggal dibanding negara tetangga, pemanfaatan AI yang inklusif dengan pelibatan *stakeholders* di luar Jawa, dan pembentukan Badan Nasional AI.²
4. Adapun beberapa konsep narasi kebijakan nasional AI, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
- Posisi nasional** Pemri atas isu AI di **lingkup global** didasarkan pada pendekatan **3+1**, yaitu mengatasi kesenjangan digital, memastikan manfaat nyata bagi masyarakat, mengantisipasi dan memitigasi risiko ke depan, serta memastikan tata kelola global yang sejalan dengan kepentingan nasional dan negara berkembang.
 - Dalam menciptakan *enabling environment* di tingkat nasional, dapat menggunakan pendekatan **TEKNO**, yaitu tata kelola nasional yang jelas dan global yang inklusif, ekosistem berimbang antara inovasi dan regulasi, kapasitas modal melalui alokasi APBN dan investasi asing, navigasi (penggunaan) teknologi sesuai kepentingan nasional, serta optimalisasi riset dan pengembangan.
 - Adapun guna menjembatani perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang, Indonesia juga dapat menggunakan formula **PRIMA ASTA**, yaitu:
 - ⌚ *Inclusive and equitable global governance.*
 - ⌚ *Promote assistance and capacity building on AI for developing countries.*
 - ⌚ *Regulation that foster innovation and development.*
 - ⌚ *International governance for humanity.*
 - ⌚ *Multilateral and multi-stakeholders partnerships.*
 - ⌚ *Advancing and expanding benefits from AI for everyone.*
 - ⌚ *Accessibility.*
 - ⌚ *Safety and security.*
 - ⌚ *Transformative AI development.*

Lanskap tata kelola AI global

5. Sementara itu, perkembangan pembahasan AI pada tatanan global di berbagai organisasi internasional, antara lain sebagai berikut:
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)** berhasil meraih capaian monumental dengan mengadopsi **Global Digital Compact (GDC)** sebagai kerangka tata kelola AI global pada bulan September 2024.
 - ⌚ Dokumen ini merupakan capaian multilateralisme setelah kurang lebih setahun dinegosiasikan secara multilateral di PBB sejak tahun 2023.
 - ⌚ Walaupun secara umum GDC mengatur tata kelola digital global, beberapa pokok norma terkait AI termuat di dalamnya, antara lain:
 - ─ AI yang *safe, secure, and trustworthy*, yang identik dengan agenda domestik AS (*US Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy*).
 - ─ Siklus hidup AI yang bertanggungjawab, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan *human-centric*.

Country Report Handover, Jakarta, 4 Oktober 2024.

² Jadi Pertama di ASEAN, Indonesia Selesaikan Penilaian Kesiapan AI UNESCO, Kemenkominfo, <https://www.kominfo.go.id/berita/siaran-pers/detail/jadi-pertama-di-asean-indonesia-selesaikan-penilaian-kesiapan-ai-unesco>.

- Adanya barang dan infrastruktur digital publik, termasuk model AI yang terbuka.
 - Pelindungan data pribadi dan keamanan pada AI.
 - Tata kelola AI yang berimbang, inklusif, dan menggunakan pendekatan berbasis risiko serta menjamin representasi setara dan penuh dari seluruh negara termasuk negara berkembang serta partisipasi bermakna dari para pemangku kepentingan.
 - Perlunya mengatasi *digital, technological, and AI divide*.
 - ☞ Di sisi lain, *way forward* pembentukan tata kelola AI global dalam GDC cenderung bersifat **eksploratori, non-binding, dan tidak memiliki langkah follow-up yang kuat** dengan hanya menggarisbawahi peran koordinatif dan bukan penegasan sentralitas PBB atau sistem PBB.
 - GDC juga secara umum belum dapat memperkuat *right to development* bagi negara berkembang.
- b. ***UN Secretary General's High-level Advisory Body on AI*** pada bulan September 2024 juga telah mempublikasikan laporan final berjudul “*Governing AI for Humanity*”. Dokumen ini memberikan 7 rekomendasi tata kelola AI global, yaitu:
- ☞ Pembentukan panel saintifik internasional terkait AI.
 - ☞ Dialog kebijakan terkait tata kelola AI.
 - ☞ Pertukaran standar AI.
 - ☞ Pembentukan jaringan pengembangan kapasitas AI.
 - ☞ Pembentukan *Global fund for AI*.
 - ☞ Kerangka kerja data AI global.
 - ☞ Adanya organ khusus terkait AI dalam lingkup Sekretariat PBB yang melapor pada Sekjen PBB.
- c. **Perserikatan Bangsa-Bangsa** melalui pembahasan di **Majelis Umum (MU PBB)** dan **Dewan HAM PBB** maupun pembahasan organisasi internasional **International Telecommunication Union (ITU)** dan **the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)** terkait dampak sosial ekonomi AI dan pertimbangan etika.

Perkembangan Pembahasan Ranres AS dan RRT di MU PBB

6. Amerika Serikat (AS) telah menginisiasi penyusunan norma internasional (*norm-shaping and norm-setting*) di MU PBB mengenai AI pada Desember 2023, yang selanjutnya resolusi *AS Safe, Secure, and Trustworthy AI* tersebut berhasil diadopsi konsensus pada tanggal 21 Maret 2024.
7. Terdapat 120 negara anggota PBB yang mendukung resolusi ini saat diadopsi, termasuk negara-negara berkembang serta Indonesia dan RRT yang pada saat akhir turut mendukung. Indonesia dapat mendukung dan menjadi *Co-Sponsor* Ranres AS dengan adanya perkembangan posisi dari RRT yang juga menjadi *Co-Sponsor* Ranres AS pada detik-detik terakhir perundingan.
8. Walaupun AS telah mengakomodasi kepentingan Indonesia terutama terkait *digital divide*, masih terdapat sejumlah *concern*, seperti potensi hambatan akses perdagangan dan teknologi serta penggunaan terminologi "*fundamental freedoms*" yang dapat ditafsirkan luas dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum maupun norma masyarakat di Indonesia.
9. Pada 7 Maret 2024, RRT telah mengumumkan akan mengajukan Ranres “*Enhancing International Cooperation on Capacity Building of AI*”. Terdapat 15 negara *core group* Ranres

ini termasuk Brasil, Indonesia, Rusia, dan Singapura. Ranres telah diadopsi konsensus pada tanggal 5 Juli 2024. Ranres RRT ini secara umum berisi dorongan peningkatan komitmen atas peningkatan kapasitas dan aspek pembangunan bagi negara berkembang, jika dibanding resolusi AS.

10. Guna menghindari rivalitas geopolitik AI dan mengawal kepentingan nasional, Indonesia mendukung resolusi AS dan mendukung ranres Tiongkok, dengan memanfaatkan dukungan tersebut sebagai *leverage* untuk mendukung posisi Indonesia di forum multilateral maupun pemajuan kepentingan bilateral dengan AS dan Tiongkok.

Perkembangan AI dan HAM di Majelis Umum dan Dewan HAM PBB

11. Dalam laporannya terkait implikasi AI pada HAM di MU PBB tahun 2018, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi mengusulkan kerangka kerja HAM untuk pemanfaatan AI oleh negara maupun sektor privat, antara lain perlunya konsultasi publik dan penilaian dampak HAM, dampak dan audit teknologi AI, dan tidak ada monopoli teknologi.

Perkembangan di International Telecommunication Union (ITU)

12. ITU telah menyetujui resolusi “*Applying artificial intelligence (AI) technologies for good*” di tahun 2022 sebagai resolusi pertama di ITU tentang AI untuk mendorong studi, berbagi informasi, dan peningkatan kapasitas teknologi AI.
13. ITU telah menyelenggarakan pertemuan *AI for Good Global Summit* (AIGGS) sejak tahun 2017 terkait standardisasi teknis dan panduan kebijakan. Pertemuan tanggal 30-31 Mei 2024 berfokus pada identifikasi aplikasi AI dan mempercepat kemajuan menuju *UN Sustainable Development Goals*.
14. ITU juga telah menyelenggarakan *World Summit on the Information Society (WSIS)+20 Forum High-Level Event* 2024 tanggal 27-31 Mei 2024 yang salah satunya berfokus pada kolaborasi pertanggungjawaban korporasi pada *ethical AI*. Menkominfo menjadi Ketua Delegasi pada pertemuan dimaksud.

Perkembangan di UNESCO

15. UNESCO telah mengadopsi dokumen *Recommendations on the Ethics of AI* pada tahun 2021, yang merupakan kerangka kerja normatif mencakup prinsip etika yang harus diterapkan oleh aktor negara maupun aktor privat.
16. UNESCO telah mengadakan *Global Forum on the Ethics of AI* pada tahun 2023 dan 2024, dengan fokus pembahasannya pada etika AI. Pertemuan pada tanggal 5-6 Februari 2024 di Slovenia berfokus untuk mempertemukan perwakilan kalangan sektor privat, akademisi dan masyarakat guna berdiskusi terkait perkembangan teknologi dan kebijakan terkini.

Perkembangan di Forum dan Organisasi Internasional Lainnya

17. ***The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*** yang membahas kebijakan dan tata kelola AI dengan fokus privasi, kekayaan intelektual, dan kompetisi. Anggota OECD juga telah mengadopsi *OECD Principles on Artificial Intelligence* pada tahun

2019 yang mempromosikan nilai inovasi dan *trustworthy AI* serta menghormati HAM dan nilai demokrasi.

OECD sejak tahun 2024 telah menyepakati *integrated partnership* dengan *Global Partnership on AI* (GPAI) di mana GPAI yang sebelumnya inisiatif *multistakeholders* saat ini berintegrasi dengan OECD, dengan mensyaratkan komitmen pada *OECD Recommendation on AI* untuk dapat bergabung dengan GPAI.

18. **G20** yang berhasil menyepakati *G20 AI Principles* yang memuat prinsip pengelolaan AI yang bertanggungjawab yang nilai-nilainya diambil dari *OECD Principles on Artificial Intelligence*.
19. **G7** yang berhasil menyepakati *G7 Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework* sebagai kerangka kerja internasional pertama terkait AI dan memuat prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang harus diterapkan seluruh aktor dalam semua siklus hidup AI.
 - G7 melalui Jepang selaku Presiden G7 2024 telah mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung pada *Hiroshima AI Process Friends Group*. Pemri telah menyatakan belum dalam posisi untuk bergabung pada inisiatif ini.
20. **World Economic Forum (WEF)** terkait dampak dari *emerging technologies* terhadap ekonomi global.
21. Secara regional, ASEAN juga turut memiliki perkembangan terkait AI, utamanya dengan peluncuran **ASEAN Guide on AI Governance and Ethics (ASEAN AI Guide)** pada tanggal 2 Februari 2024 dan berjalannya negosiasi **ASEAN Digital Economy Framework Agreement (ASEAN DEFA)**.
 - a. ASEAN AI Guide diharapkan menjadi panduan praktik badan usaha yang menggunakan teknologi AI *dual-use*. Dokumen dimaksud secara umum sejalan dengan G20 AI Principles namun belum menyentuh masalah *digital and AI divide*.
 - b. ASEAN DEFA akan memasuki putaran perundingan kesembilan pada bulan Februari 2025. Pembahasan perihal AI difokuskan pada *Chapter 7: Cooperation on Emerging Technologies* yang menitikberatkan pada kerja sama AI termasuk pembentukan komite kerja sama regulatori AI. Masih belum terdapat kesepahaman di antara *stakeholders* internal mengenai tingkat komitmen kerja sama AI.
 - c. Pada tahun 2024, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia telah memulai rencana investasi dan proyek terkait dengan AI dengan nilai berkisar puluhan hingga ratusan juta USD.
 - d. Masih ada beberapa tantangan terkait AI di ASEAN, antara lain, ketimpangan kapasitas digital dan teknologi terutama di Kamboja, Laos, dan Myanmar serta ketertinggalan secara umum negara ASEAN lain dibanding Singapura.
22. Terdapat juga perkembangan pembahasan AI yang berasal dari inisiatif unilateral dan sektor privat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Inggris telah menginisiasi pelaksanaan **AI Safety Summit (AISS)** yang pertama kali dilaksanakan pada bulan November 2023 dan berhasil menghasilkan *Bletchley Declaration* yang menitikberatkan pada isu keamanan *AI frontier*.
 - b. Korea Selatan bersama Inggris telah menjadi tuan rumah **AI Seoul Summit** tanggal 21-22 Mei 2024 ini yang menghasilkan pernyataan awal kerja sama 10 negara ditambah Uni Eropa terkait institusi keamanan AI.
 - c. Prancis pada September 2023 telah membentuk Komisi AI di bawah pemerintahan Perdana Menteri Elisabeth Borne. Komisi AI selanjutnya pada Maret 2024 berhasil mengeluarkan dokumen *Our AI: Our Ambition for France* yang merupakan buku putih kebijakan untuk mendorong kepemimpinan Prancis terkait AI.

- ❖ **Prancis** yang pada 2023 menyatakan akan menjadi tuan rumah AISS setelah Korea Selatan, akan menjadi tuan rumah *AI Action Summit* (AIAS) tanggal 10-11 Februari 2025 dengan fokus pada *AI governance*, berbeda dengan AISS yang berfokus pada *AI safety*.
- d. **RRT** pada bulan Oktober 2023 telah meluncurkan inisiatif ***Global AI Governance Initiative*** yang mengedepankan perlunya peran lebih negara berkembang serta konsep *cyber sovereignty* dan *Interim Measures for the Management of Generative AI Services* yang mengatur layanan AI generatif (pembuatan teks, gambar, audio, video, dan konten lainnya) kepada publik di RRT.
- e. **AS** pada era Presiden Biden (Oktober 2023) telah mengeluarkan *Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy AI* yang menekankan standar baru keamanan dan keselamatan AI, pelindungan HAM, mendorong inovasi dan persaingan usaha, serta penguatan kepemimpinan AS di lingkup global terkait AI.
 - ❖ Presiden-terpilih Trump mengindikasikan perubahan kebijakan AI yang menekankan pada **pro-bisnis, pro-inovasi, anti-agenda ‘radikal kiri’ (isu HAM, LGBT, dan perubahan iklim), dan deregulasi**.
- f. **Uni Eropa** telah mengesahkan ***EU AI Act*** di tahun 2024 yang menekankan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) untuk memastikan kepatuhan perusahaan sebelum merilis produk AI ke publik.
- g. ***The Partnership on AI (PAI)*** yang diinisiasi oleh perusahaan teknologi bidang AI seperti **Amazon, Google, Deepmind, Facebook, IBM, dan Microsoft** sebagai platform diskusi dan *engagement* dengan para peneliti dan pemangku kepentingan AI.

Penyelenggaraan pemerintahan dan kecerdasan artifisial

23. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan dengan digitalisasi (antara lain dengan bantuan kecerdasan artifisial) merupakan salah satu dari lima prioritas Pemri di bidang AI, baik berdasarkan Strategi Nasional AI BRIN/BPPT 2020-2045 (Stranas AI, diterbitkan bulan Juli 2020) maupun Lima Prioritas Vertikal Utama Strategi AI Nasional Kemenkomdigi.
24. Kemenpan-RB tengah mendorong peningkatan kapasitas bagi ASN untuk memanfaatkan AI dan *big data* untuk mendukung terwujudnya *smart government* sesuai dengan RPJPN 2025-2045.³
25. Pemri memandang bahwa AI merupakan bagian dari motor perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - a. Beberapa lembaga pemerintahan telah melakukan pengolahan data berbasis AI untuk mengurangi waktu dan biaya operasional.
 - b. Pemri tahun ini akan meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai layanan terintegrasi lintas kementerian sehingga tidak ada lagi tumpang tindih layanan berbasis digital baik yang dikelola pusat maupun daerah.
 - c. Kemenkomdigi juga telah melakukan pengawasan terhadap konten negatif menggunakan AI.
 - d. Lembaga Administrasi Nasional telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan *Tony Blair Institute* dan platform *Apolitical* pada bulan Oktober 2024 guna pembinaan pegawai ASN dalam bidang AI dan pemerintahan digital.

³ Pemerintah Dorong Adopsi AI dan *Big Data* untuk Transformasi Digital, Infokomputer, <https://infokomputer.grid.id/read/124177655/pemerintah-dorong-adopsi-ai-dan-big-data-untuk-transformasi-digital>.

AI dalam konteks lapangan kerja, inovasi, produktivitas, dan keterampilan kerja

26. Keberadaan AI termasuk penggunaannya yang semakin meluas di tengah masyarakat, menurut Kemenkomdigi dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan peluang besar sekaligus tantangan, terutama bagi generasi muda.
- ☞ Walaupun data mengindikasikan akan digantikannya sekitar 85 juta pekerjaan oleh AI pada tahun 2025, tetapi pada saat yang bersamaan akan lahir 90 juta pekerjaan baru di bidang baru seperti pengembangan AI, data sains, dan kolaborasi manusia dengan AI.
27. Sebagai negara dengan populasi usia produktif sangat tinggi dari keseluruhan penduduk (69,58% per data Kemendagri tahun 2024), pengembangan talenta menjadi prioritas bagi Pemri, terlebih dalam menghadapi era digitalisasi dan *emerging technologies* termasuk AI.
28. Pengembangan talenta digital juga merupakan salah satu dari lima prioritas Pemri di bidang AI, baik berdasarkan Stranas AI maupun Lima Prioritas Vertikal Utama Strategi AI Nasional Kemenkomdigi.
- a. Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital hingga tahun 2030 untuk menguasai teknologi digital, termasuk AI.
 - b. Dalam hal ini, Kemenkomdigi tengah mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan industri guna melahirkan solusi inklusif dan berkelanjutan dalam pengembangan talenta digital Indonesia.
 - c. Kemenkomdigi juga menekankan perlunya pemerataan infrastruktur telekomunikasi, terutama agar generasi muda di wilayah pelosok dapat mengakses teknologi AI.

Saran Rekomendasi

29. Beberapa posisi yang kiranya dapat disampaikan pada pertemuan dalam konteks hubungan AI dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun AI dengan lapangan kerja, inovasi, produktivitas, dan keterampilan kerja, antara lain, sebagai berikut:
- a. Penggunaan AI baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maupun lapangan kerja **tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran manusia**, melainkan untuk **mempermudah dan menghindarkan risiko guna melindungi manusia, makhluk hidup, dan/atau kesehatan**, serta **tetap memastikan peran manusia baik secara langsung atau sebagai pengawas** dalam penggunaan AI.
 - b. Penggunaan AI baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maupun lapangan kerja kiranya perlu **memerhatikan adanya perbedaan kapasitas di antara negara-negara di dunia**, baik **kapasitas SDM, teknologi, infrastruktur, maupun finansial**, sehingga perlu adanya upaya konkret untuk **mengatasi ketimpangan kapasitas** tersebut.
 - c. Penggunaan AI utamanya dalam konteks inovasi kiranya memerhatikan **keseimbangan antara penghormatan terhadap kreator/inovator dan kreasi/inovasi** termasuk dalam konteks hak kekayaan intelektual, fasilitasi dan insentif yang memungkinkan kreasi/inovasi bertumbuh, serta asesmen berkala terhadap manfaat dan risiko/dampak negatif dalam pemanfaatan AI.

Agenda Demographic Shifts

Latar Belakang

1. Jumlah penduduk dunia diperkirakan terus bertambah hingga mencapai 8 miliar pada tahun 2022 (UN, 2022). Adapun penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 328 juta pada tahun 2050 (BKKBN).
 - ① Jumlah penduduk yang besar menjadi potensi mendorong pembangunan apabila dipersiapkan menjadi SDM yang produktif;
 - ② Indonesia telah berada dalam masa bonus demografi sejak 2012, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat mencapai level 74.39 (tinggi) pada tahun 2023.
2. Berdasarkan data BPS dan Bappenas, bonus demografi Indonesia diperkirakan akan berakhir pada 2039 dan memasuki tahap *aging population* pada 2045. Sehingga diperlukan langkah-langkah untuk pencapaian bonus demografi sebagai syarat keberhasilan visi Indonesia Emas 2045.

Perkembangan

3. Sejumlah tantangan pencapaian bonus demografi masih dihadapi Indonesia, antara lain: (i) sebaran penduduk yang tidak merata; (ii) kualitas penduduk usia 15-64 tahun belum memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (iii) laju urbanisasi tinggi namun tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; dan (iv) belum tersedia data kependudukan dan statistik yang lengkap dan berkualitas.
4. Pemerintah terus kembangkan kebijakan untuk optimalisasi sekaligus perpanjang siklus bonus demografi, yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan kebijakan antara lain:
 - a. RPJMN 2020-2024 tentang penciptaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, a.l melalui peningkatan keterampilan vokasional;
 - b. Misi pembangunan Asta Cita 3 (meningkatkan lapangan kerja berkualitas) dan Asta Cita 4 (pembangunan SDM);
 - c. Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga;
 - d. Peraturan Presiden No. 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.
5. Sejumlah strategi pencapaian bonus demografi juga terus dikembangkan Pemerintah, meliputi:
 - a. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
 - b. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas untuk tingkatkan penyerapan tenaga kerja;
 - c. Mengatasi penduduk usia muda *Not in Education, Employment, or Training* (NEET), antara lain dengan memastikan akses pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja yang inklusif;
 - d. Meningkatkan partisipasi kerja perempuan melalui kebijakan ketenagakerjaan yang sensitif gender, dan akses peluang kerja yang lebih luas;
 - e. Menguatkan literasi keuangan dan investasi bagi seluruh penduduk.

Rekomendasi:

6. Parlemen perlu mendukung upaya Pemerintah melalui perumusan kebijakan untuk menjawab tantangan Perubahan Demografi di masa mendatang, meliputi :

- a. Mewujudkan **pertumbuhan penduduk yang seimbang**, a.l. melalui perluasan program KB di seluruh wilayah dan menekan angka pernikahan usia muda;
- b. Mendorong **kebijakan lintas sektoral yang mendukung *lifelong learning*** untuk peningkatan kualitas manusia, a.l. di bidang ketenagakerjaan, teknologi informasi, dan Pendidikan;
- c. Peningkatan **kualitas kesehatan dan harapan hidup masyarakat**, a.l melalui pemerataan akses, infrastruktur, dan kualitas layanan kesehatan hingga di wilayah pelosok;
- d. Penguatan sistem **pelindungan sosial** yang efektif dan terukur, inklusif, serta berbasis digital untuk menghindari kesalahan dalam hal penyaluran dan pemanfaatan;
- e. Penyusunan **kebijakan lansia yang komprehensif** untuk memfasilitasi lansia produktif, a.l. dengan memperpanjang usia pensiun, memberi akses pasar kerja bagi lansia untuk sektor-sektor spesifik, meningkatkan usia harapan hidup, serta peningkatan literasi lansia terhadap instrumen investasi;
- f. Penguatan **balai pelatihan kerja** a.l. untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan sesuai kebutuhan pasar kerja;
- g. Mendorong **kewirausahaan** a.l melalui pengenalan wiraswasta sebagai profesi di kalangan pelajar, serta pemberian berbagai insentif bagi UMKM;
- h. Memastikan **ketahanan pangan dan lingkungan**, a.l. melalui promosi pola konsumsi bergizi dan sehat, peningkatan produktivitas produk pertanian, dan pengolahan limbah makanan untuk hindari pencemaran lingkungan;
- i. Mendorong **migrasi** yang merata a.l dengan membangun pusat pertumbuhan wilayah baru dan mendorong pembangunan ekonomi desa untuk mencegah urbanisasi.

Agenda Update on Energy Markets and Trends

a) Kondisi Global

Pasar energi global saat ini sedang menghadapi ketidakpastian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi harga minyak global, ketegangan geopolitik, serta pergeseran menuju energi terbarukan, sehingga Indonesia, sebagai negara pengimpor energi, perlu mengelola resiko dengan cara yang lebih fleksibel dan adaptif, sambil tetap mengutamakan kestabilan pasokan energi.

b) Posisi Indonesia

- Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, memiliki kebutuhan energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan industrialisasi. Meskipun demikian, ketergantungan Indonesia pada impor energi, terutama minyak, menjadi tantangan besar dalam mencapai ketahanan energi.
- Indonesia menyikapi perkembangan pasar energi global dengan strategi adaptif, yang mengedepankan diversifikasi sumber energi termasuk pemanfaatan gas alam, transisi ke energi terbarukan, serta efisiensi energi.
- Oleh karena itu, Presiden Indonesia telah merencanakan berbagai langkah untuk mencapai swasembada energi guna memastikan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi impor. Rencana swasembada energi Indonesia bertujuan untuk:
 - Mengurangi ketergantungan pada impor energi
 - Meningkatkan ketahanan energi nasional sehingga memastikan pasokan energi yang cukup dan stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong perkembangan industri, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - Mendukung komitmen aksi iklim dalam rangka pengurangan emisi dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
 - Menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung sektor industri dalam negeri.

c) Swasembada Energi Indonesia

- Untuk mencapai swasembada energi, Indonesia telah merumuskan beberapa strategi utama yang mencakup:
 - Peningkatan pemanfaatan berbagai sumber energi terbarukan, mencakup energi surya, geothermal, angin, bioenergi, dan air.
 - Selain mengembangkan energi terbarukan, Indonesia terus mengupayakan diversifikasi dalam pemanfaatan sumber energi fosil yang lebih rendah emisi, misalnya gas alam.
 - ④ Indonesia memiliki cadangan gas alam yang cukup besar.
 - ④ Gas alam dianggap sebagai energi transisi yang lebih bersih dibandingkan batubara dan minyak.
 - ④ Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan pemanfaatan pembangkit listrik berbasis gas sebagai langkah transisi menuju penggunaan energi terbarukan.
 - Salah satu kunci untuk mencapai swasembada energi adalah memperkuat infrastruktur energi seperti jaringan distribusi gas dan listrik, terminal LNG, serta pengembangan *smart grid* untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan.
 - Memanfaatkan AI untuk mengelola pasokan dan distribusi energi secara lebih efisien.
 - Dengan peningkatan adopsi kendaraan listrik, Indonesia juga berencana untuk memperluas infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, yang akan menjadi bagian penting dari transisi energi dan swasembada energi.

- Indonesia akan terus membangun teknologi penyimpanan energi (seperti baterai besar) untuk lebih mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam sistem energi nasional dan mengelola fluktuasi pasokan energi terbarukan.

d) Efisiensi Energi

- Efisiensi energi memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada impor energi dan memitigasi dampak fluktuasi harga energi global.
- Indonesia telah mulai mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan rumah tangga telah dilakukan seiring penerapan standar efisiensi energi untuk bangunan, kendaraan, dan peralatan rumah tangga.

e) Just Transition

- Transisi energi di Indonesia harus dilakukan dengan tetap menghindari dampak negatif terhadap sektor ekonomi yang sebelumnya banyak bergantung pada energi fosil.
- Sebagai bagian dari upaya transisi energi yang adil, Indonesia memperhatikan pentingnya keadilan sosial bagi daerah-daerah yang selama ini bergantung pada sektor energi fosil. *Just transition* dimaksud mencakup penyediaan pelatihan keterampilan, menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau, dan mengurangi dampak sosial dari proses transisi.

f) Kerja Sama Internasional dan Peran OECD

- Dinamika pasar energi global membutuhkan kerja sama internasional, khususnya untuk memastikan pemenuhan dukungan dan sarana implementasi seperti teknologi dan pendanaan.
- Kerja sama dengan OECD akan berperan penting dalam mendukung transisi energi Indonesia, misalnya dalam hal:
 - Peningkatan akses ke teknologi energi bersih dan berbagai pengetahuan tentang kebijakan transisi energi yang berhasil di negara lain.
 - Pembiayaan hijau dan inovasi pembiayaan lainnya untuk mendukung proyek-proyek energi bersih dan infrastruktur transisi.
 - Memberikan dukungan teknis kepada Indonesia dalam merancang kebijakan energi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon.

Agenda Competition Policy

Gambaran umum

30. Ketentuan perundang-undangan Indonesia mengenai persaingan usaha secara garis besar didasarkan pada UU No.5 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**UU Persaingan Usaha**”).
 - ☞ UU Persaingan Usaha lahir sejalan semangat reformasi untuk membentuk tatanan ekonomi nasional yang adaptif dengan globalisasi namun tetap sesuai nilai-nilai ekonomi Pancasila, Undang-Undang ini lahir bersamaan dengan ketentuan krusial lain di bidang ekonomi seperti Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
31. Secara umum terdapat dua pendekatan utama pengaturan persaingan usaha di dunia, yaitu pendekatan *antitrust* AS (mengedepankan pengendalian aksi korporasi agar tidak menimbulkan perusahaan yang sangat dominan) dan pendekatan *competition law* Eropa (mengedepankan kompetisi pasar yang sehat guna efisiensi pasar dan melindungi kesejahteraan masyarakat).
 - ☞ Pengaturan di Indonesia cenderung ke arah *competition law* Eropa sebagaimana dalam Pasal 3 UU Persaingan Usaha, walaupun pada perkembangan terkini terutama secara prosedural, Indonesia mengadopsi beberapa praktik di AS.
32. Walaupun UU Persaingan Usaha telah diperbarui pada tahun 2023, perubahan tersebut belum mengakomodasi perkembangan terkini terkait penegakan hukum persaingan usaha, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*).
 - b. Pendekatan *ex post* atau penindakan pasca pelanggaran yang kurang mencegah potensi *abuse* oleh pelaku usaha, terutama dalam konteks ekonomi digital.
 - c. Persaingan usaha terkait *big tech*.
 - d. Persaingan usaha lintas batas (*cross-border competition law*).
33. Secara khusus dalam kaitan persaingan usaha terkait *big tech*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tengah menyidangkan dugaan monopoli yang dilakukan oleh Google yang telah dimulai sejak 28 Juni 2024.
 - ☞ Google diduga telah melakukan monopoli melalui pengenaan kewajiban bagi *developer* yang mendistribusikan aplikasinya pada *Google Play Store* untuk menggunakan *Google Play Billing System* tanpa memberikan alternatif pembayaran lain, yang dianggap menimbulkan hambatan pasar jasa penyediaan pembayaran dan merugikan baik *developer* maupun konsumen.

Saran penyampaian posisi Pemri

34. Beberapa posisi yang kiranya dapat disampaikan pada pertemuan dalam konteks persaingan usaha, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Kerangka dan penegakan persaingan usaha yang kuat menjadi elemen penting dalam terwujudnya **ekonomi global yang inklusif** dan memastikan **no one left behind** dalam menikmati manfaatnya.
 - ☞ Secara khusus, kerangka dan penegakan persaingan usaha perlu memberikan **pelindungan** utamanya terhadap **pelaku usaha UMKM, pemuda, dan wanita**.
 - b. **Era digital** membawa perubahan signifikan terhadap perekonomian global, termasuk

terkonsentrasi penguasaan dan pelaku pasar teknologi oleh *big tech* yang jika tidak dikendalikan berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi maupun *digital divide*.

- ☞ Dalam hal ini, perlu adanya **diskursus global yang inklusif dan melalui proses yang bersifat multilateralisme** mengenai kerangka persaingan usaha terhadap peran *big tech* dalam ekonomi, khususnya guna memastikan **peran bermakna negara berkembang dan UMKM dalam perekonomian global**.
- c. Perkembangan dewasa ini semakin membaurkan batasan antarnegara, yang antara lain menjadikan perilaku pelaku usaha dapat berdampak lintas batas, termasuk perilaku persaingan usaha tidak sehat.
 - ☞ Dalam hal ini, kiranya **kerja sama internasional terkait persaingan usaha perlu ditingkatkan**, baik dalam rangka penyeragaman kapasitas penegakan hukum persaingan usaha melalui ***technical assistance and capacity building*** maupun **kerja sama penegakan hukum persaingan usaha lintas batas (*cross-border competition law*)**.

Agenda Special Session on Accession

Proses Aksesi Indonesia

1. Pada tanggal 14 Juli 2023, Pemri mengajukan permohonan aksesi sebagai anggota OECD melalui surat Menko Perekonomian kepada Sekretaris Jenderal OECD.
2. Permohonan aksesi Indonesia disetujui dalam Pertemuan Dewan OECD pada tanggal 20 Februari 2024.
 - è Surat dari Sekjen OECD kepada Presiden RI menyampaikan persetujuan Pertemuan Dewan OECD pada tanggal yang sama.
3. Tanggal 2-3 Mei 2024, Menko Perekenomian, didampingi Menteri Keuangan secara resmi menerima *Accession Roadmap* (Peta Jalan Aksesi) Indonesia di OECD dari Sekjen OECD saat pelaksanaan *OECD Ministerial Council Meeting /MCM*.
4. Sesuai *best practice* yang berlaku, setelah peluncuran Peta Jalan Aksesi, Indonesia masih akan melalui beberapa tahapan:
 - a. *Initial Memorandum*
 - ➔ Indonesia diberikan waktu untuk melakukan *self-assessment* terhadap hal-hal yang tertuang dalam Peta Jalan Aksesi;
 - ➔ Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara kandidat aksesi lain seperti Brazil dan Kosta Rika, diperlukan waktu kurang lebih 1 tahun untuk melakukan penyusunan *self-assessment* dimaksud;
 - ➔ Apabila *self-assessment* telah selesai dilakukan, Pemri dapat menandatangani *Initial Memorandum*;
 - b. *Technical Committee Reviews*
 - ➔ Berbagai Komite di OECD akan melakukan kajian terhadap regulasi dan kebijakan Pemri dalam berbagai sektor sesuai portfolio OECD;
 - ➔ Sesuai Peta Jalan Aksesi, terdapat 26 Komite yang akan melaksanakan review dengan Indonesia selama proses aksesi;
 - ➔ Hal-hal yang dikaji oleh berbagai Komite tersebut meliputi evaluasi, baik kebijakan politis maupun regulasi Pemri, agar sesuai dengan standar OECD.
 - ➔ Proses kajian ini memakan waktu karena diperlukan penyesuaian regulasi domestik untuk memenuhi standar OECD.
 - c. *Committee Recommendations*
 - ➔ Dari waktu ke waktu, Komite akan melakukan kajian terhadap perubahan regulasi dan kebijakan, serta kesiapan Pemri untuk menyesuaikan diri dengan standar dan prinsip OECD;
 - ➔ Hasil kajian Komite akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
 - d. *Formal Opinion*
 - ➔ Apabila hasil kajian dipandang baik dan telah sejalan dengan standar OECD, Komite dapat memberikan *formal opinion* kepada Dewan OECD mengenai kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan OECD.
 - e. *Council Decision on Membership*
 - ➔ Dewan OECD, berdasar *formal opinion* dari berbagai Komite, dapat memutuskan diterima atau tidaknya Indonesia sebagai anggota OECD.
 - f. *Accession Agreement*
 - ➔ Apabila Dewan OECD memutuskan untuk menerima Indonesia sebagai anggota OECD, Pemri dapat menandatangani *Accession Agreement* dengan OECD, diikuti

- dengan prosedur aksesi perjanjian internasional pada umumnya, seperti deposit instrumen dan pengesahan di dalam negeri.
- ➡ Setelah resmi menjadi anggota, Indonesia akan dikenai kontribusi keanggotaan yang besarnya akan ditentukan berdasar tingkat GDP.

Perkembangan Proses Aksesi

5. Setelah Indonesia menerima Peta Jalan Aksesi, Pemri telah melakukan beberapa langkah menindaklanjuti proses aksesi Indonesia di OECD.
 - a. Presiden Joko Widodo menetapkan Keppres No. 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia Dalam OECD, untuk mempersiapkan dan mendorong proses aksesi Indonesia ke OECD.
 - ① Tim Nasional dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan didukung oleh dua wakil: Menkeu dan Menlu.
 - b. Selanjutnya, Menko Perekonomian mengeluarkan Keputusan No. 232 Tahun 2024, menetapkan pembagian tanggung jawab dalam Tim Nasional dan menunjuk Menteri / Kepala Lembaga terkait yang bertanggung jawab atas isu-isu, sesuai dengan Komite terkait di OECD.
 - ① Pembagian kerja memastikan adanya delegasi tanggung jawab yang jelas dan efisien dalam proses aksesi.
 - c. Pemri juga lakukan langkah strategis terkait aksesi OECD, antara lain melalui integrasi aksesi OECD dalam RPJPN dan RPJMN serta pembentukan *Project Management Office* (PMO) untuk mendukung Tim Nasional OECD.
 - d. Kemenko Perekonomian juga telah membuat Portal Aksesi OECD, untuk :
 - ① mendokumentasikan proses aksesi Indonesia,
 - ① memberikan informasi mengenai proses perkembangan tinjauan yang dilakukan oleh masing-masing Komite, undangan dan dokumen terkait pertemuan yang akan diselenggarakan,
 - ① sampaikan laporan dari setiap K/L yang menghadiri pertemuan terkait aksesi.
 - e. Saat ini, Tim Nasional tengah bekerja sama secara terintegrasi dengan K/L terkait agar *Initial Memorandum* dapat diselesaikan sesegera mungkin.
 - ① Kemenko Perekonomian telah mengadakan pertemuan awal lintas Lembaga guna pastikan semua substansi *Initial Memorandum* selaras dengan tujuan kebijakan Indonesia.
 - ① Menko Perekonomian telah memberikan arahan agar Tim Nasional dapat segera selesaikan *Initial Memorandum*.
6. Dalam rangka mendukung proses aksesi Indonesia, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, telah 2 kali melakukan kunjungan ke Indonesia pasca penyerahan Peta Jalan.
7. Kunjungan pertama pada tanggal 27 – 29 Mei 2024 untuk melakukan peluncuran Peta Jalan Aksesi Indonesia di OECD, dan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Bogor, 28 Mei 2024.
8. Kunjungan kedua dilakukan setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, pada tanggal 24 – 28 November 2024.
 - a. Tanggal 26 November 2024, Sekjen OECD meluncurkan 2024 *Indonesia Economic Survey*, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI.
 - è 2024 *Indonesia Economic Survey* merupakan survei ekonomi ke-8 yang diselenggarakan OECD dan Kemkeu RI sejak tahun 2007.
 - è Dua tema besar yang diangkat adalah mengenai ekonomi digital dan transisi hijau.

- è Survei terbagi dalam 4 bab yang membahas: 1) kebijakan makroekonomi; 2) konvergensi sosial-ekonomi; 3) digitalisasi; dan 4) transisi hijau.
- è Hasil survei tersebut menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan daya tahan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global.
- ① Pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan sebesar 5,1% pada 2024 dan 5,2% pada 2025.
- ① Dengan inflasi terkendali di 1,71% per Oktober 2024 dan surplus perdagangan selama 54 bulan berturut-turut menjadi indikator kuatnya fundamental ekonomi Indonesia.
- b. Tanggal 27 November 2024, Sekjen OECD bertemu dengan Menko Perekonomian
 - è Menko Perekonomian didampingi oleh Wamen Bappenas, Deputi Bidang Perekonomian Bappenas, Deputi Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi /BKPM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemenlu, dan Sekjen KLHK.
 - è Pertemuan membahas langkah ke depan yang perlu dilakukan Pemri dalam proses aksesi, yaitu koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan *Initial Memorandum* untuk melihat posisi regulasi di Indonesia *vis-à-vis* standar OECD.
- c. Tanggal 28 November 2024, Sekjen OECD diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.
 - è Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menko Perekonomian, Menlu, dan Menkeu.
 - è Dalam pertemuan, Presiden RI sampaikan komitmen untuk melanjutkan proses aksesi di OECD, sementara Sekjen OECD menyampaikan kembali berbagai manfaat yang dapat diperoleh Indonesia jika menjadi anggota OECD.
- d. Lebih lanjut, komitmen Indonesia untuk melanjutkan proses aksesi OECD ditegaskan oleh Menlu RI, terutama pada dua kesempatan:
 - è pernyataan Menlu RI saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR-RI, tanggal 2 Desember 2024; dan
 - è Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) Tahun 2025, tanggal 10 Januari 2025

Kesiapan dan Manfaat Indonesia menjadi Anggota OECD

9. OECD adalah forum yang secara reguler melakukan kajian atas berbagai tantangan dalam pembangunan ekonomi, melalui pertukaran pengalaman dan perumusan solusi atas dasar praktik terbaik atau *best practices*.
 - è Selama lebih dari 50 tahun menjadi sumber utama analisis kebijakan berbasis bukti dan data ekonomi yang diandalkan
 - è dapat ditarik kesimpulan adanya korelasi positif antara tingkat pendapatan nasional dan per kapita yang tinggi dengan penerapan *best practices policies*
10. Indonesia mewakili kawasan Asia Tenggara yang dikenal memiliki rekam jejak pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas politik sangat baik.
 - è keanggotaan Indonesia akan memberikan nilai tambah, baik secara politis maupun substantif, bagi OECD untuk menjadi organisasi yang makin relevan dan lebih universal
 - è bagi Indonesia, keanggotaan dalam OECD akan memberi peluang keikutsertaan dalam pembahasan dan proses penyusunan norma dan standard yang akan diterapkan oleh berbagai negara
11. Secara umum, regulasi dan kebijakan Indonesia pada tiga sektor (investasi, ketenagakerjaan, serta antikorupsi) telah cukup selaras dengan standar OECD. Namun, implementasi kebijakan masih memerlukan optimalisasi agar sejalan dengan standar internasional.

12. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam hal kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing, yang saat ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia (*Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*).
 - ④ Menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk memenuhi standar OECD dalam upaya pemberantasan korupsi trans-nasional.
13. Analisis dampak sosial-ekonomi mengindikasikan bahwa aksesi ke OECD berpotensi memberikan manfaat positif bagi Indonesia.
 - ④ Secara umum di banyak negara yang melakukan aksesi, terlihat indikasi peningkatan arus masuk investasi asing langsung (FDI) dan keterbukaan perdagangan pasca-aksesi.
 - ④ Namun, kenaikan FDI ini membutuhkan waktu dan tidak signifikan terlihat dalam jangka pendek.
14. Data juga menunjukkan adanya potensi peningkatan daya saing, terutama dalam aspek kesiapan teknologi setelah suatu negara bergabung dengan OECD.
15. Peningkatan signifikan juga terlihat dalam pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (research and development, R&D), yang krusial untuk inovasi dan daya saing ekonomi.
16. Hal penting lainnya yang juga menjadi fondasi penting pertumbuhan ekonomi adalah perbaikan institusi.
 - ④ Negara-negara yang telah bergabung dalam OECD menunjukkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan upaya antikorupsi
 - ④ Perbaikan institusional cenderung bersifat permanen.
17. Pengalaman Korea Selatan sejak bergabung dalam OECD pada 1996 dapat juga dijadikan pelajaran atau catatan berharga.
 - è Pada saat itu, pendapatan per kapita Korsel sebesar 14.694 dollar AS (sementara pendapatan per kapita OECD adalah 20.840 dollar AS).
 - è Sementara tahun 2006, atau dalam kurun 10 tahun, angka tersebut naik menjadi 21.743 dollar AS, kemudian melonjak menjadi 29.280 dollar AS di tahun 2016. Pada 2022, pendapatan per kapita Korsel telah mencapai 32.422 dollar AS.
 - è Selain PDB per kapita yang naik tinggi, indikator umum negara maju juga dicapai Korsel di sektor pertanian, ekonomi, pendidikan, energi, lingkungan hidup, sosial, penyediaan lapangan kerja, kesehatan, dan keuangan.
 - è Kekayaan terdistribusi cukup merata di kalangan penduduknya, dengan rasio gini 0.333 pada 2020. Artinya, kesenjangan pendapatan tidak begitu lebar di Korsel, bahkan jika dibandingkan dengan negara OECD lainnya (data Bank Dunia).
18. Memperhatikan beberapa indikator tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh Indonesia, antara lain:
 - ④ harmonisasi regulasi domestik dengan standar OECD, terutama dalam hal penyuapan transnasional, perlu diprioritaskan;
 - ④ fokus implementasi kebijakan dan penguatan kapasitas institusi harus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas reformasi;
 - ④ peningkatan investasi dalam infrastruktur digital dan program pelatihan diperlukan untuk memfasilitasi akses yang lebih baik ke layanan publik online.
 - ④ Pemerintah perlu memperhatikan lebih detail terkait regulasi lingkungan di Indonesia. Dalam beberapa indikator, terlihat bahwa standar kebijakan lingkungan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan norma OECD.

Agenda 2025 Global Outlook on Financing for Sustainable Development

1. Komitmen Indonesia terhadap SDGs

- Dengan upaya kuat, terlepas dari tantangan global, capaian SDGs Indonesia sudah jauh lebih tinggi dari rerata dunia:
 - Dari 224 indikator SDGs yang tersedia datanya, 62% (138 indikator) telah mencapai target, sedangkan 14% lainnya (31 indikator) menunjukkan trend *on track*.
 - Termasuk dalam indikator yang *on track* tersebut adalah *No Poverty; Quality Education; Gender Equality* serta *Industry, Innovation and Infrastructure*.
 - Secara keseluruhan terdapat 76% indikator SDGs yang telah tercapai dan mengalami kemajuan menuju pencapaian yang lebih baik.
 - Masih terdapat 24% atau 55 indikator yang perkembangannya masih memerlukan perhatian khusus.
- Baru-baru ini, Indonesia juga turut menyepakati *Pact of the Future* yang menekankan basis penguatan multilateralisme pada generasi muda, teknologi dan SDGs – ketiga elemen dimana Indonesia dapat memainkan peran kepemimpinan di panggung global.
- Tidak dapat dipungkiri, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang patut dicontoh dalam akselerasi pencapaian SDGs, antara lain:
 - Menyelaraskan SDGs ke dalam berbagai kebijakan, peraturan dan program nasional dan daerah, termasuk ke dalam RPJMN dengan berpedoman terhadap program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI yang tertuang dalam Asta Cita.
 - Melokalkan SDGs dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa
 - ① Sampai dengan September 2022, terdapat 31 provinsi yang telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs melalui Peraturan Gubernur.
 - ② Pemerintah Daerah provinsi juga berkewajiban untuk menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs.
 - ③ Peningkatan kapasitas serta dukungan bagi daerah dilakukan secara berkesinambungan.
 - Penguatan kemitraan multipihak (*multistakeholders partnership*) dalam pencapaian SDGs, melalui penguatan kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, Pelaku Usaha, Media dan Filantropi.
 - Memobilisasi pendanaan pembangunan, termasuk melalui mekanisme pendanaan inovatif, seperti *blended finance, SDGs bonds and sukuk*.
 - Pengembangan SDGs Center di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang dapat memfasilitasi policy research dan peningkatan kapasitas dan inovasi.
 - Membumikan istilah dan kerangka kerja SDGs terutama dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar.

2. Pendanaan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pendanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melibatkan berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa komponen utama pendanaan meliputi:

- Pemerintah Indonesia mengalokasikan sebagian besar pendanaan pembangunan berkelanjutan melalui APBN, dengan fokus pada program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hijau, dan energi terbarukan.
- Pemerintah juga melibatkan APBD untuk mendukung pembangunan yang lebih spesifik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Sektor swasta, baik domestik maupun asing, juga berperan penting dalam mendanai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendanaan ini sering kali berupa investasi

langsung, kemitraan publik-swasta, atau melalui instrumen keuangan hijau seperti obligasi hijau.

- Indonesia juga menerima pendanaan dari lembaga-lembaga internasional dan mitra pembangunan global, dan lembaga-lembaga bilateral lainnya seringkali memberikan pinjaman atau hibah untuk mendukung berbagai proyek pembangunan berkelanjutan.
- Indonesia juga terlibat dalam berbagai mekanisme pembiayaan internasional seperti *Green Climate Fund* untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Indonesia juga mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan hijau, seperti obligasi hijau, untuk menarik investasi yang mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan.

3. Tantangan Pendanaan

- Meskipun pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan berkelanjutan, keterbatasan sumber daya fiskal tetap menjadi tantangan. Kebutuhan untuk membiayai berbagai program sosial dan infrastruktur seringkali berkompetisi dengan kebutuhan mendesak lainnya.
- Masih terdapat kesenjangan pendanaan yang cukup besar untuk mencapai semua target SDGs. Dalam hal ini, pembiayaan yang inovatif dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci.
- Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta, serta dalam memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh, Indonesia perlu memperkuat kerangka pendanaan yang ada dan meningkatkan kerjasama internasional. Hal ini termasuk mengoptimalkan penggunaan instrumen finansial inovatif, memperkuat mekanisme pendanaan berbasis sektor swasta, serta memperluas akses terhadap sumber pendanaan internasional.

4. Peluang Kerja Sama dengan OECD

- Akses ke pengetahuan dan analisis kebijakan untuk menjajaki peluang pertukaran informasi dari negara-negara OECD mengenai kebijakan fiskal dan pendanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan efisien.
- Berbagi pengalaman dan praktik terbaik untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik dan swasta, serta mengidentifikasi area prioritas yang memerlukan investasi lebih besar.
- Pengembangan dan peningkatan akses ke berbagai instrumen pendanaan hijau untuk mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan.
- Dukungan OECD untuk mengembangkan pasar finansial hijau, serta memfasilitasi kemitraan publik-swasta untuk menarik pendanaan tambahan dalam infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam.
- Penguatan kapasitas dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif dan memadai untuk mengelola dana pembangunan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- Optimalisasi pemanfaatan platform OECD misalnya *Global Infrastructure Facility* untuk mempertemukan donor, investor, dan negara penerima dana.
- Pengembangan kerangka pengukuran dan evaluasi yang lebih baik melacak progres pencapaian SDGs, dan memastikan pendanaan dialokasikan secara tepat sesuai dengan prioritas pembangunan.

- » Membangun dukungan dalam pengintegrasian SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan sektoral.

Bahan Umum Perubahan Iklim

1. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) adalah kerangka protokol yang mengatur kerja sama penanganan perubahan iklim. UNFCCC diadopsi pada tahun 1992, dan hingga saat ini terdapat 197 ratifikasi negara pihak dan Uni Eropa.
2. Pengambil keputusan utama UNFCCC dilakukan melalui ***Conference of the Parties (COP)*** yang bertemu setiap tahun. Keputusan adalah *country-driven* dengan peran Sekretariat UNFCCC terbatas pada dukungan implementasi keputusan COP.
3. Tujuan utama pembahasan dalam UNFCCC COP adalah stabilisasi konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi pada level yang dapat mencegah dampak negatif. Pencapaian level aman tersebut harus dalam kerangka waktu yang cukup bagi ekosistem bumi untuk secara alami beradaptasi dan tidak menganggu kegiatan produksi bahan makanan, serta pembangunan ekonomi dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.
4. Prinsip-prinsip dalam UNFCCC, yaitu:
 - a. *Common but differentiated responsibilities and respective capabilities* (CBDR-RC), yaitu bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab penurunan GRK lebih besar dibandingkan negara-negara berkembang;
 - b. *Intergenerational equity*, yaitu bahwa perlindungan terhadap iklim harus bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa depan;
 - c. *Precautionary measures*, yaitu bahwa prinsip kehati-hatian harus diperhatikan dalam antisipasi dan mitigasi dampak buruk perubahan iklim.
5. Pada *Conference of the Parties (COP)* UNFCCC ke-21, negara pihak berhasil mengadopsi *Paris Agreement* pada tahun 2015, a.l. sebagai upaya dalam mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk dengan membatasi kenaikan suhu global dan mengurangi emisi karbon global. Elemen utama dalam Persetujuan Paris, yaitu:
 - a. Mencegah kenaikan suhu global sebesar 2C, dan mengejar upaya membatasi kenaikan suhu global dibawah **1.5C** pada akhir abad; Meningkatkan kapasitas para negara pihak untuk beradaptasi terhadap efek negatif perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan dan penurunan emisi GRK dengan cara yang tidak akan mengurangi produksi pangan; dan Menjaga alur pendanaan agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang mendukung penurunan emisi GRK (pasal 2).
 - b. Kewajiban semua Negara Pihak untuk menyampaikan **NDC**. Kontribusi penurunan tersebut **harus meningkat** setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan **dukungan** untuk meningkatkan ambisi tersebut (Pasal 3).
 - c. Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi **mitigasi** (Pasal 4).
 - d. Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil, seperti **REDD+** (Pasal 5).
 - e. Pengembangan kerja sama sukarela antarnegara dalam rangka meningkatkan ambisi penurunan emisi termasuk melalui **mekanisme pasar dan non-pasar** (Pasal 6).

- f. Penetapan tujuan global adaptasi untuk meningkatkan kapasitas **adaptasi**, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, khususnya bagi negara berkembang (Pasal 7).
 - g. Pengakuan pentingnya meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan (**loss and damage**), termasuk dampak yang tidak dapat dipulihkan, akibat dampak buruk perubahan iklim (Pasal 8).
 - h. **Kewajiban negara maju** menyediakan sumber **pendanaan** untuk membantu negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi. Pihak lain dapat pula memberikan dukungan secara sukarela (Pasal 9).
 - i. Peningkatan aksi kerja sama seluruh negara dalam hal pengembangan dan **alih teknologi** (Pasal 10).
 - j. Perlunya kerja sama Para Pihak untuk memperkuat kapasitas negara berkembang dalam implementasi Persetujuan Paris dan kewajiban negara maju untuk memperkuat dukungan bagi **peningkatan kapasitas** di negara berkembang (Pasal 11).
 - k. Kerja sama Para Pihak dalam upaya penguatan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik, partisipasi publik, dan akses publik terhadap **informasi** mengenai perubahan iklim (Pasal 12).
 - l. Pembentukan dan pelaksanaan kerangka kerja **transparansi** dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan efektivitas implementasi, meliputi aksi maupun dukungan dengan fleksibilitas bagi negara berkembang. Kerangka ini merupakan pengembangan dari yang sudah ada di bawah Konvensi/UNFCCC (Pasal 13).
 - m. Pelaksanaan secara berkala inventarisasi dari implementasi Persetujuan Paris untuk menilai kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan Persetujuan Paris (**Global Stocktake**) dimulai tahun 2023 dan selanjutnya dilakukan setiap lima tahun (Pasal 14).
 - n. Pembentukan mekanisme untuk memfasilitasi implementasi dan mendorong **kepatuhan** terhadap Persetujuan Paris (Pasal 15).
6. Sebagai hasil utama dari UNFCCC COP29 tahun 2024 adalah selesainya pembahasan teknis *Article 6* dimana mekanisme perdagangan karbon antar negara di bawah *Paris Agreement* akan dapat beroperasi secara penuh. Selain itu juga disepakati *key outcome* berupa *Baku Climate Unity Pact* (rujukan dokumen terkait pada <https://unfccc.int/cop29/auvs>), mengenai:
- a. **New Collective Quantified Goals**
 - ④ Dari sisi *quantum*, meski menyatakan perlunya *scaling up* pendanaan untuk aksi iklim negara berkembang senilai USD 1,3 trilyun per tahun pada 2035, namun target yang ditetapkan untuk NCQG adalah USD 300 miliar per tahun pada 2035;
 - ④ Dari sisi *contributors*, tidak memperjelas aspek mobilisasi pendanaan dari negara maju, namun mendorong keterlibatan negara berkembang untuk turut berkontribusi melalui skema KSS, serta sumber lain, termasuk sektor swasta dan sebagai alternatif;
 - ④ Dari sisi *scope*, difokuskan mendukung NDCs dan peningkatan ambisi negara berkembang, namun tidak mencakup *loss and damage* dan tanpa alokasi spesifik bagi LDCs dan SIDs;
 - b. **Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Program**
 - ④ Mendorong *parties, observers* dan *other stakeholders* untuk menyampaikan submisi tentang topik yang akan didiskusikan pada *Global Dialogue 2025* (dengan tenggat waktu 25 Februari 2025), dan pandangan mengenai *design* dan *feature platform* untuk fasilitasi pelaksanaan aksi mitigasi (dengan tenggat waktu 1 Mei 2025);
 - c. **Global Goal on Adaptation**

④ Menyepakati modalitas penentuan indikator implementasi adaptasi yang akan ditetapkan pada *United Arab Emirates-Belem work program*, dengan kriteria utama agar tidak melebihi 100 indikator; *globally applicable*; merefleksikan berbagai konteks adaptasi dan memungkinkan *assessment of progress*;

Perkembangan Kebijakan Indonesia

1. Komitmen aksi iklim Indonesia tercantum pada dokumen *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca Indonesia. NDC merupakan kewajiban Persetujuan Paris dan komitmen nasional yang menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan rendah emisi dan berketahtaan iklim.
2. Pada September 2022, Indonesia telah menyampaikan dokumen ***Enhanced NDCs*** yang di dalamnya memuat peningkatan penurunan emisi GRK dengan kemampuan sendiri, **semula 29% menjadi 31,89%**, sedangkan dengan dukungan internasional dari **41% menjadi 43,20%**.
 - a. Peningkatan tersebut didasarkan pada kebijakan sektoral antara lain, FOLU Net-Sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, target 100 persen pemanfaatan biodiesel B-40 pada 2030, peningkatan aksi pemanfaatan *sludge* IPAL di sektor limbah, dan peningkatan target di sektor pertanian serta industri.
 - b. Kebijakan lain yang menjadi tambahan muatan dalam ENDC antara lain, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sebagai dasar penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, kebijakan terkait aksi adaptasi Program Kampung Iklim, kebijakan penguatan fungsi Sistem Registri Nasional (SRN) sebagai *carbon registry* dan platform Satu Data GRK dalam kerangka transparansi, serta kebijakan penguatan pendanaan iklim melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sejak Oktober 2019.
3. Sebagai satu paket dengan NDC, Indonesia juga telah menyampaikan ***Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050***, yang memuat visi dan *pathways* Indonesia menuju *net-zero emissions* dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahtaan iklim dan berkeadilan. Sektor agrikultur, kehutanan dan lahan (FoLU) dan sektor energi dinilai akan menjadi sektor utama dalam mencapai visi *net-zero emissions* pada 2060 atau lebih cepat.
4. Pada Februari 2025, Indonesia berencana mengajukan *Second NDCs* yang memuat peningkatan ambisi selaras dengan pembatasan target kenaikan temperatur bumi sebesar 1,5 derajat Celcius.
5. Indonesia telah melakukan upaya strategis untuk mengurangi emisi GRK dan menanggulangi dampak perubahan iklim, antara lain:
 - a. Membangun Kerangka Transparansi Nasional sesuai Pasal 13 *Paris Agreement*, melalui Sistem Registri Nasional (SRN).
 - b. Berkomitmen untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan untuk mencapai ketahanan energi nasional, dengan komposisi energi terbarukan sebesar 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025 dan sebesar 31% pada tahun 2050.
 - c. Moratorium izin pembukaan lahan yang melindungi 66 juta ha hutan dan lahan gambut.
 - d. Dari sisi pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim pada 5 (lima) sektor yang terverifikasi menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi pengurangan emisi GRK sebesar 68.986.099 ton CO₂e dan tahun 2020 sebesar 573.951.814 ton CO₂e dari baseline.
 - e. Proyeksi rehabilitasi *mangrove* hingga 600.000 ha sampai dengan akhir 2024.

- f. Penurunan tingkat deforestasi pada 2020 capai titik terendah sebesar 115 ribu hektar.
 - g. Menekan kebakaran hutan hingga 290 ribu hektar pada tahun 2020, dibanding 2,6 juta hektar pada tahun 2015, dan 1,6 juta hektar pada tahun 2019.
6. Dalam rangka pengaturan mekanisme pasar terkait karbon, Pemri telah menerbitkan:
- a. **Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).** Penyusunan Perpres ini ditujukan untuk: (i) menjadi landasan hukum instrumen NEK dan pendanaan lingkungan dalam memenuhi target NDCs; (ii) menangkap peluang pasar dalam perdagangan karbon; dan (iii) memberikan insentif bagi para pelaku pengurangan emisi gas rumah kaca.
 - b. **Peraturan Menteri LHK No 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon,** sebagai regulasi derivatif Perpres 98/2021 tersebut.
7. Dalam hal implementasi nilai ekonomi karbon, Indonesia juga perlu menampilkan *leading by example* atas kemajuan yang telah dilakukan, termasuk melalui peluncuran secara resmi Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023.
- a. Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon.
 - b. Perdagangan kredit karbon oleh Indonesia bertujuan untuk mendorong pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan ke depan, menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.

Posisi Indonesia untuk Perubahan Iklim

1. Bagi Indonesia, **implementasi sama pentingnya dengan ambisi.**
 - a. Mendorong realisasi komitmen pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global sebesar 100 miliar USD (yang dijanjikan pada tahun 2020) untuk direalisasikan hingga 2025.
 - b. Mendorong negara maju untuk memimpin komitmen pengurangan emisi, melalui dukungan pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas, termasuk melalui kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.
2. Indonesia **memandang pentingnya peningkatan kemitraan dan kerjasama global berdasarkan semangat kesetaraan dan saling menguntungkan,** terutama dalam:
 - a. Mengembangkan dan mendorong transfer teknologi ramah lingkungan
 - b. Meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan, terutama bagi negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim
 - c. Memobilisasi berbagai sumber daya untuk pendanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - d. Indonesia terus mendorong negara maju untuk memenuhi komitmen penyediaan dana penanganan perubahan iklim sebesar USD 100 miliar/tahun kepada negara berkembang.
 - e. Meningkatkan kerja sama peningkatan dan pengembangan kapasitas.

Posisi Indonesia terkait Peran Parlemen dalam Mendorong Aksi Perubahan Iklim

1. Parlemen sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai untuk mengawal pemerintah dalam melaksanakan mandat Persetujuan Paris, khususnya komitmen perubahan iklim yang tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) sesuai target dan alur waktu yang sudah dijanjikan. Parlemen dapat berperan mengawal pemenuhan komitmen dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi, ruang-ruang koordinasi, dan sumber daya yang tersedia.
2. Pada **aspek regulasi**, Parlemen dapat mendorong dan memastikan terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai undang-undang sektoral terkait perubahan iklim, misalnya pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan energi. Termasuk di dalamnya yakni memastikan pemerintah menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan dan membentuk kelembagaan yang diamanatkan, dan jika diperlukan, menginisiasi undang-undang khusus tentang perubahan iklim yang mendorong percepatan pencapaian target NDC.
3. Pada **aspek pendanaan**, perlu diperhatikan bahwa kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan iklim dengan ketersediaan dana publik masih sangat besar. Parlemen dapat mendorong pemerintah untuk memastikan terlaksananya peta jalan pemenuhan target NDC melalui dukungan anggaran dan koordinasi pendanaan iklim yang efisien dan efektif. Koordinasi pendanaan iklim yang melibatkan berbagai aktor (publik dan swasta) dengan sumber pendanaan iklim beragam (dalam dan luar negeri) wajib mendapat perhatian dan pengawalan dari parlemen agar alokasi pendanaan terjamin efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
4. Pada **aspek transparansi dan akuntabilitas**, sesuai dengan mandat Persetujuan Paris, setiap aksi dan sumber daya yang dikerahkan guna mengatasi dampak perubahan iklim wajib dikomunikasikan secara transparan kepada publik. Sejalan dengan itu, parlemen dapat menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan anggaran melalui pengembangan sistem informasi pendanaan iklim yang terintegrasi. Hal ini akan memudahkan publik untuk berpartisipasi aktif mengawasi pengelolaan dana iklim secara efektif dan efisien.
5. Parlemen juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan pusat data dan informasi terkait perubahan iklim, di antaranya:
 - a. Mengkaji, menganalisis, dan menyusun laporan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang yang terkait dengan perubahan iklim, dan beberapa sektoral terutama di bidang kehutanan, perlindungan lingkungan hidup, pertanian berkelanjutan, dan energi.
 - b. Melakukan inventarisasi berbagai kebijakan dan regulasi perubahan iklim pada berbagai tingkat peraturan, hingga peraturan-peraturan teknis di tingkat daerah.
 - c. Melakukan analisis kebijakan iklim, termasuk mengidentifikasi kesenjangan, peluang, dan tantangan pencapaian target penurunan emisi GRK sesuai NDC.
 - d. Melakukan analisis terhadap penandaan anggaran iklim oleh pemerintah untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan alokasi dan pelaksanaan pendanaan iklim di tiap-tiap kementerian/lembaga terkait.
 - e. Menganalisis efektivitas koordinasi pendanaan iklim Indonesia, terutama dalam hal sinkronisasi dan koordinasi pendanaan berbagai sumber.
 - f. Mengembangkan instrumen pemantauan pelaksanaan berbagai kebijakan dan pendanaan iklim agar pengelolaan dan penggunaannya transparan dan dapat diakses bebas oleh masyarakat.



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id
Phone: (62-21) 5715813
ksap.dpr.go.id